

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENAGGULANGAN VIRUS CORONA TERHADAP
PERILAKU MASYARAKAT DI KECAMATAN
DUMBO RAYA KOTA GORONTALO**

OLEH:

**Rizal Datau
S.21.15.085**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DI KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO

Oleh

RIZAL DATAU

S2115085

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana dan telah disetujui oleh tim pembimbing
pada tanggalGorontalo, September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II




Marten Nussa, S.IP., M.AP
NIDN : 0901038502



Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah in:

Nama : Rizal Datau

NIM : S2115085

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Virus Corona Terhadap Perilaku Masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo” adalah benar benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini terdapat karya dan pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ichsan Gorontalo.

Gorontalo, 12 Desember 2021

A handwritten signature in black ink is written over a pink and yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'ECCB8AJX564324255'.

Rizal Datau
NIM: S2115085

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subbahanahuwata'ala, karena dengan kuasa-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penelitian ini banyak hal yang menjadi kendala dalam penyusunan, baik dari sisi penentuan materi skripsi, referensi, maupun lainnya. Olehnya sangat dibutuhkan beragam masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan dari skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih kepada : Bapak Ichsan Gaffar, SE, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Darwawaty Abdurazak, S.IP, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Marten Nusi, S.IP, M.Ap selaku pembimbing I, Ibu Deliana Dzakaria, S.IP, M.IP, serta seluruh dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalalo yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dimana telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga bisa sampai pada titik akhir studi pada program studi Ilmu Pemerintahan.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan tentu harapannya adalah mendapatkan masukan dari pihak lain tentang skripsi ini.

Gorontalo, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Kebijakan	10
2.2 Konsep Implementasi.....	13
2.3 Konsep Perilaku	28
2.4 Konsep Pemberdayaan.....	25
2.5 Kerangka Pikir	38
2.6 Hipotesis.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian	42
3.2 Metode Penelitian	42
3.3 Definisi Operasional.....	42
3.4 Populasi dan Sampel	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Prosedur Penelitian.....	46
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Peneliian	53
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	63
4.3 Pembahasan.....	68
4.4 Kesimpulan dan Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu kewenangan karena dibuat oleh sekelompok individu yang mempunyai kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan. Keputusan akhir yang telah ditetapkan memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik atau public servant untuk melakukan tindakan kedepannya. Kebijakan publik menjadi faktor penting dalam pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Hal tersebut bergantung kepada setiap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dampak yang dirasakan oleh objek kebijakan tersebut. Sering kali kebijakan publik yang dilaksanakan tidak berpihak kepada rakyat dan justru hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berada di tengah masyarakat.

Pada dasarnya kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang umumnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh para pemangku kebijakan. Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Kebijakan publik sebagai proses yang krusial seringkali

dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu. Sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya, hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik. Salah satunya adalah tentang masalah kebencanaan.

Pada tahun 2020, seluruh dunia di gemparkan dengan adanya penyakit yang mematikan yang menyebar dengan cepat keseluruh dunia yang dikenal dengan Virus Corona atau Covid-19. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia.

Virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.

Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu.

Dari data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pertanggal 28 Mei 2020 didapatkan bahwa terdapat 215 negara yang terjangkit, dengan total terinfeksi 5.488.825 orang dan 349.095 kasus yang meninggal dunia. Sedangkan kasus Covid-19 di Indonesia sampai pada bulan Mei, terdapat 24.538 kasus positif terinfeksi dan 1.496 kasus meninggal dunia.

Sampai saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, salah satunya adalah melalui kebijakan. Adapun kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian diikuti oleh Peraturan menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) demikian definisi PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu

lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan keduanya sangat penting bagi masyarakat karena keduanya saling mendukung keberhasilan satu dengan lainnya. Walaupun pada kenyataannya sering kali terjadi ketimpangan antar keduanya. Ketimpangan ini yang menjadikan efektifitas suatu kebijakan menurun dan dapat menjadi faktor kegagalan suatu kebijakan

Menurut peneliti, sangat menarik untuk mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat dengan adanya upaya penanggulangan virus corona melalui berbagai kebijakan. Apalagi dengan adanya konstruksi pemberitaan suatu media, bagaimana wartawan atau media mengkonstruksi pemberitaan tersebut dalam menyusun fakta, mengisahkan fakta, menulis fakta, dan menekankan fakta berita hingga masyarakat seakan digiring untuk lebih menyoroti pada pemberitaan wacana pandemi Covid 19 di Indonesia.

Dengan demikian, peneliti telah menyimpulkan judul dari paparan latar belakang, yaitu pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona terhadap perilaku masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a) Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo?
- b) Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo?
- c) Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- d) Untuk Menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
- e) Untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) terhadap

perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan dalam ilmu pemerintahan, khususnya dalam implementasi kebijakan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca bahwa sesungguhnya tentang perilaku masyarakat dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemic virus corona.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan implikasi pemahaman dalam mempelajari implementasi kebijakan, khususnya dalam menganalisis penanggulangan virus corona.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan

Definisi kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Lebih lanjut, Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Abidin (2012 :6) memberikan arti kebijakan sebagai *“a projected programe of goals, values and practices”* (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah).

Dari dua definisi tersebut di atas dipahami bahwa kebijakan adalah suatu konsep yang erat kaitannya dengan pencapaian tujuan. Kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan seperti yang dikemukakan oleh Winarno (2012 : 19) bahwa ‘kebijakan’ atau ‘policy’ digunakan untuk menjelaskan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Makmur (2011: 11) bahwa:

“Kebijakan yang dilakukan oleh petinggi-petinggi atau dengan kata lain pengelola negara. Kebijakan adalah suatu bentuk keputusan yang mengikat bagi orang tertentu atau dengan kata lain orang banyak dengan

tataran strategis dan mengarah kepada yang lebih bersifat garis besarnya saja terhadap sesuatu yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dan otoritas privat”.

Sedangkan menurut Ali dkk (2011: 8) bahwa :

“secara aksiologi kebijakan memiliki sasaran yang diinginkan, yaitu efisien, efektif, kebersamaan, keadilan, dan berbagai nilai-nilai filosofis lainnya. Pada lokus pemerintahan, kebijakan harus dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pada lokus ekonomi, kebijakan berkaitan dengan permasalahan sosial baik itu berkenaan dengan kesejahteraan sosial masyarakat maupun yang berkenaan dengan ekonomi makro seperti kebijakan tentang penyediaan bahan bakar minyak. Pada lokus politik, kebijakan bersentuhan dengan kekuasaan dalam pengertian tidak saja pada negara, akantetapi pada publik, pada kelompok kepentingan, dan persoalan pilihan yang harus diambil dan diperlakukan”.

Kebijakan dapat disebut kebijakan publik jika memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Adanya pernyataan kehendak, berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau sejumlah kemauan untuk tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas, berarti ada kewenangan yang dimiliki atau yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau organisasi, terlepas dari kewenangan diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratisasi yang berlangsung.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan

dalam artian seluas-luasnya. Pengaturan dilakukan melalui kegiatan administrasi, melalui kegiatan pengelolaan, dan melalui penuangan kehendak lewat aturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status (Ali dkk, 2012: 10).

Menurut Adisasmita (2011: 113) bahwa Pengertian kebijakan publik dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan yang menjadi arahan bagi instansi-instansi terkait untuk dilaksanakan.
3. Kebijakan publik merupakan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah yang penting dalam masyarakat.
4. Kebijakan publik bersifat positif dalam artian merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau melarang melakukan sesuatu.
5. Kebijakan publik dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik mempunyai daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Konsep Implementasi

1. Definisi Implementasi

Implementasi dalam kamus besar Webster dirumuskan bahwa “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); “*to give practical effect to*” (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Konsep implementasi diatas memberi pengertian bahwa implementasi adalah perbuatan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap sesuatu yang merupakan objek dari implemementasi itu sendiri.

Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 149) tentang definisi implementasi :

Proses implementasi sebagai “*those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012: 148) mengemukakan bahwa :

Implementasikan diartikan sebagai aktivitas pelaksanaan, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pendapat Grindle lebih luas dibandingkan dengan pendapat kedua penulis di atas. Menurut Grindle dalam Winarno (2012: 149), implementasi adalah menyuruh menyelesaikan pekerjaan dan melakukannya. Jones menambahkan

bahwa implementasi adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan.

Menurut Mazmanian, Daniel A dan Sabatier Paul A. (dalam Winarno, 2012: 150) mengemukakan bahwa implementasi Kebijakan pemerintah mengandung makna tertentu, yaitu :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk meng-administrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Berdasarkan pendapat di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Ali dkk (2012: 90) menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terjadi sejumlah faktor yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dan faktor yang dimaksud adalah (1) isi kebijakan, (2) lingkungan politik, (3) kelompok sasaran, (4) lingkungan. Jika keempat faktor dipandang sebagai sub-sistem yang bersinteraksi satu dengan yang lainnya, dua faktor yang terdiri dari faktor lingkungan politik dan faktor lingkungan dapat dikaji sebagai satu kesatuan sub sistem lingkungan kebijakan.

Tahap implementasi merupakan tahap yang penting dan kritis yang memerlukan kerjasama segenap pihak dalam penyusunan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan, dilakukan persiapan yang matang dalam segala hal yang menyangkut program, misalnya organisasi, tenaga kerja termasuk kualifikasi orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam siklus pengelolaan program, setelah langkah persiapan dan persetujuan pihak yang berwenang, akan tiba pada tahap implementasi yang merupakan operasionalisasi keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun perlu diingat bahwa terdapat faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi yang dikemukakan oleh Abidin (2012: 157), sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena; (1) samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak dapat terinci), sarana dan penentuan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada, (2) kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, (3) kadang-kadang perundang-undangan mempunyai begitu banyak lubang, sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-obyek kebijakan dapat mengelaknnya, hal mana dapat mematahkan semangat para pelaksana, (4) kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga manusia).

2. Informasi

Kurangnya informasi dari para faktor terhadap objek kebijakan dan struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan obyek dukungan.

3. Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan akan dipersulit jika pelaksana tidak cukup dukungan untuk suatu kebijakan. Juga kurang kesediaan obyek-obyek kebijakan untuk kerja sama pada pelaksana, serta obyek-obyek kebijakan “terikat” kepada kegiatan-kegiatan tertentu oleh kewajiban-kewajiban sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dari obyek-obyek kebijakan sedikit, jika peraturan-peraturan ini bertentangan dengan pendapat yang dianut oleh obyek-obyek kebijakan, atau keputusan mereka.

4. Pembagian potensi

Gagalnya suatu kebijakan dapat pula disebabkan karena adanya pembagian potensi diantara aktor-aktor yang terlibat didalamnya dan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak disertai dengan pembatasan-pembatasan yang jelas, serta adanya desentralisasi dalam pelaksanaan.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian

kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran-sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

2. Model Implementasi Kebijakan

a. Model George C. Edwards III

Edwards III (1980) dalam Winarno (2012: 177) mengembangkan implementasi kebijakan mengajukan dua premis penting, yaitu : (1) *what are the precondition to successful policy implementation?* (2) *what are the primary abstract to successful policy?* Dari pertanyaan ini, Edward ingin mengetahui kondisi apakah yang diperlukan bagi suksesnya implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, Edward III mengajukan 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah : (1) Komunikasi (*communication*), (2) sumber daya (*resources*), (3) disposisi (*disposition*), (4) struktur birokrasi (*beureucratic structure*).

(1) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*).

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi,

tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan public agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

(2) Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan publik. Bagaimanapun jelas konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

(3) Disposisi / Watak atau sikap pelaksana

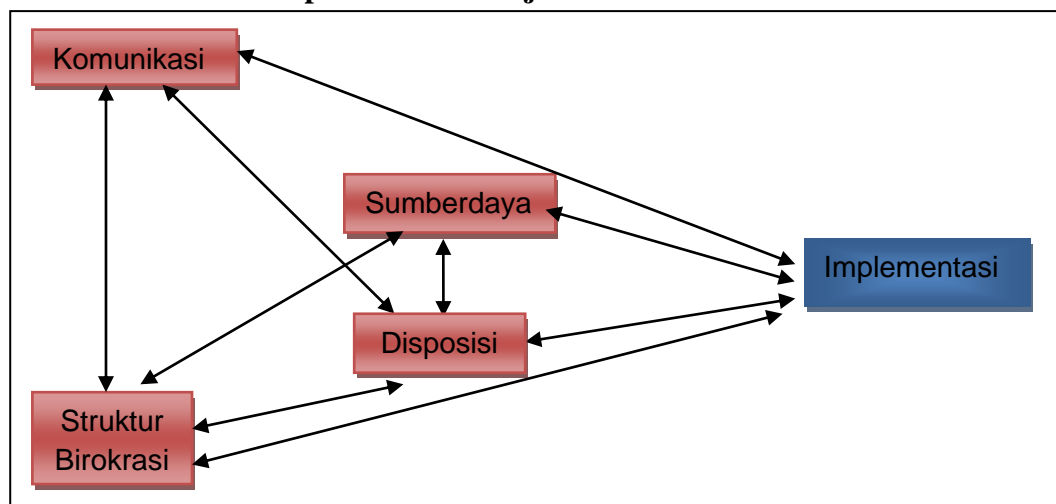
Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementators*) untuk melaksanakan kebijakan. Kemudian ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan sejauh mana para pelaku kebijakan (*Implementators*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

(4) Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya tidak efisiennya struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi luar dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut diatas, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara sistematis model proses implementasi kebijakan publik oleh Edwards III dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III



Sumber : Winarno, 2012:177

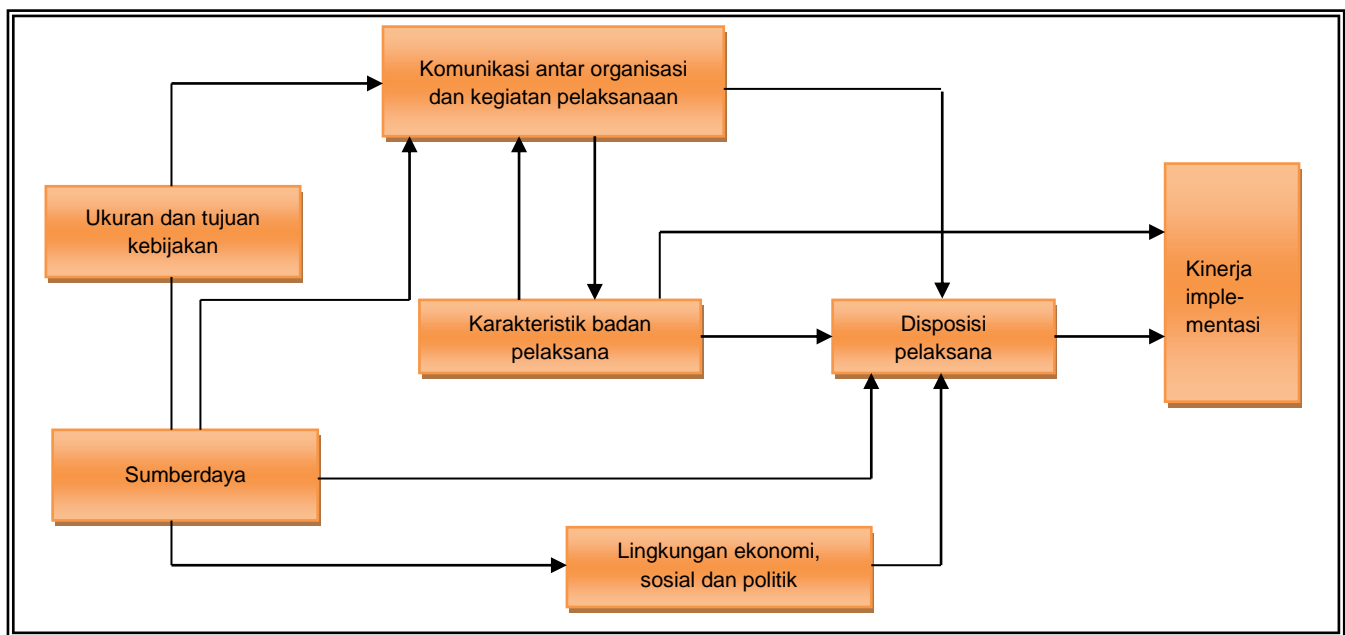
b. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1995)

Menurut Meter dan Horn (Ali dkk, 2012: 96), ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- (1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- (2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- (3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- (4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Gambar 2. Model Implementasi Meter dan Horn



Sumber :Winarno, 2012:160

- (6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Ali, 2012: 94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

- (1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) :

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-maslaah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terdapat program relatif berbeda.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Anngkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

(2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) :

- a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara Dunia Ketiga, khususnya di Indonesia salah satu

sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

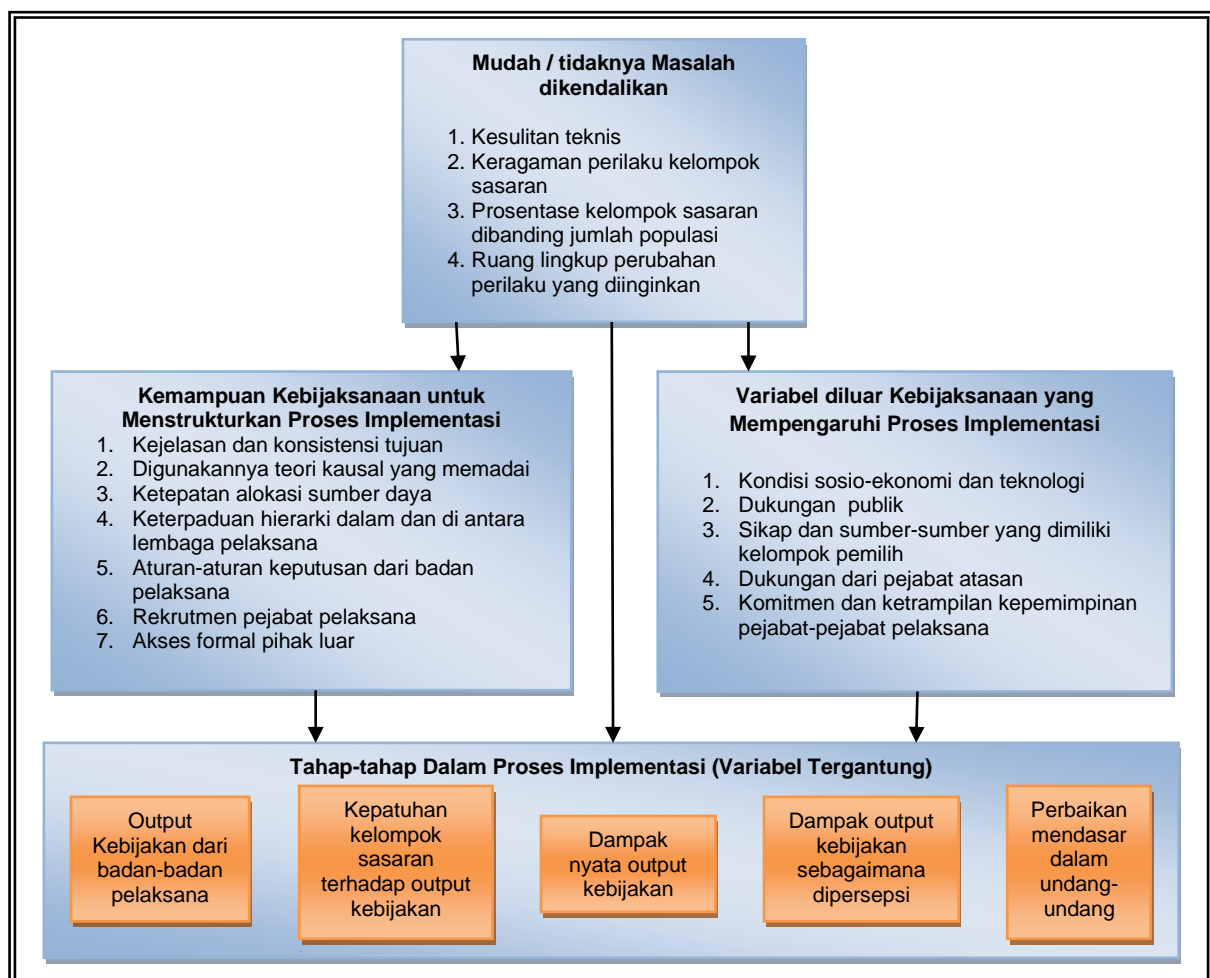
(3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*):

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (1) Kelompok pemilih dapat

melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksanaan melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

- d) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Gambar 3 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier





Sumber :Ali, 2012:94

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Ali, 2012: 95) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

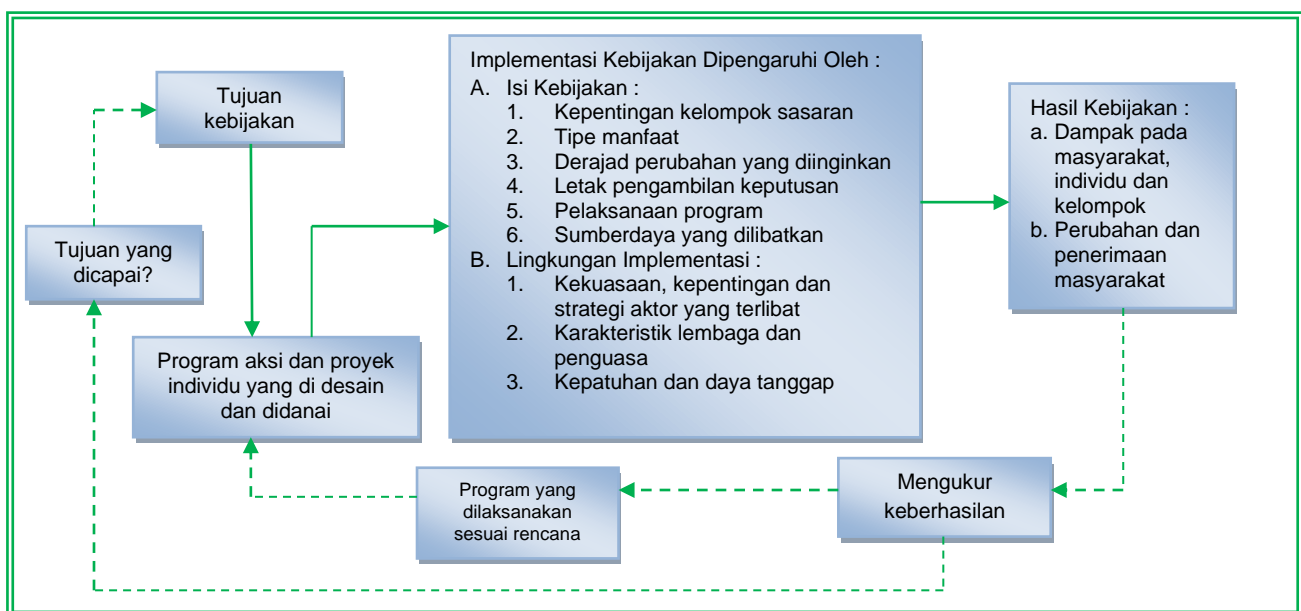
Variabel isi kebijakan ini mencakup :

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau listrik daripada menerima program kredit sepeda motor;
- (3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin;
- (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika Gerbang Taskin memiliki program peningkatan kemandirian masyarakat dengan memberikan pelatihan dan bantuan dana kepada keluarga miskin, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di instansi tertentu;
- (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan
- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
- (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Gambar 4. Model Implementasi Grindle



Sumber :Ali, 2012:95

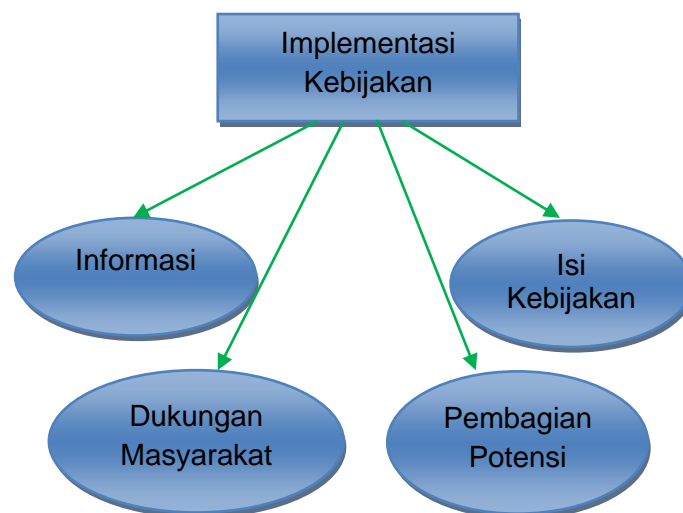
e. Model Jan Merse

Merse dikutip oleh Kadji (2008) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1) informasi; (2) isi kebijakan; (3) dukungan masyarakat (fisik dan non) fisik) dan (4) pembagian

potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program.

Penegasan Merse sebagaimana pada ilustrasi gambar di bawah ini menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*. Oleh karena itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan. Model implementasi kebijakan menurut Jan Merse seperti pada gambar berikut ini :

Gambar 5. Model Implementasi Menurut Merse.



2.3 Konsep Perilaku

Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian perilaku di kemukakan pendapat beberapa ahli, diantaranya : Robert Kwick dalam Soekidjo (2003) mengatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati. Selanjutnya dalam ensiklopedia Amerika mengartikan perilaku adalah suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti

perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Hal senada dikemukakan juga oleh Muller, (1996) bahwa perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan nyata. Terjadi perubahan perilaku biasanya di dahului atau dipengaruhi oleh perubahan sikap dan pengetahuan. Tetapi dalam hal tertentu, bisa juga terjadi sebaliknya.

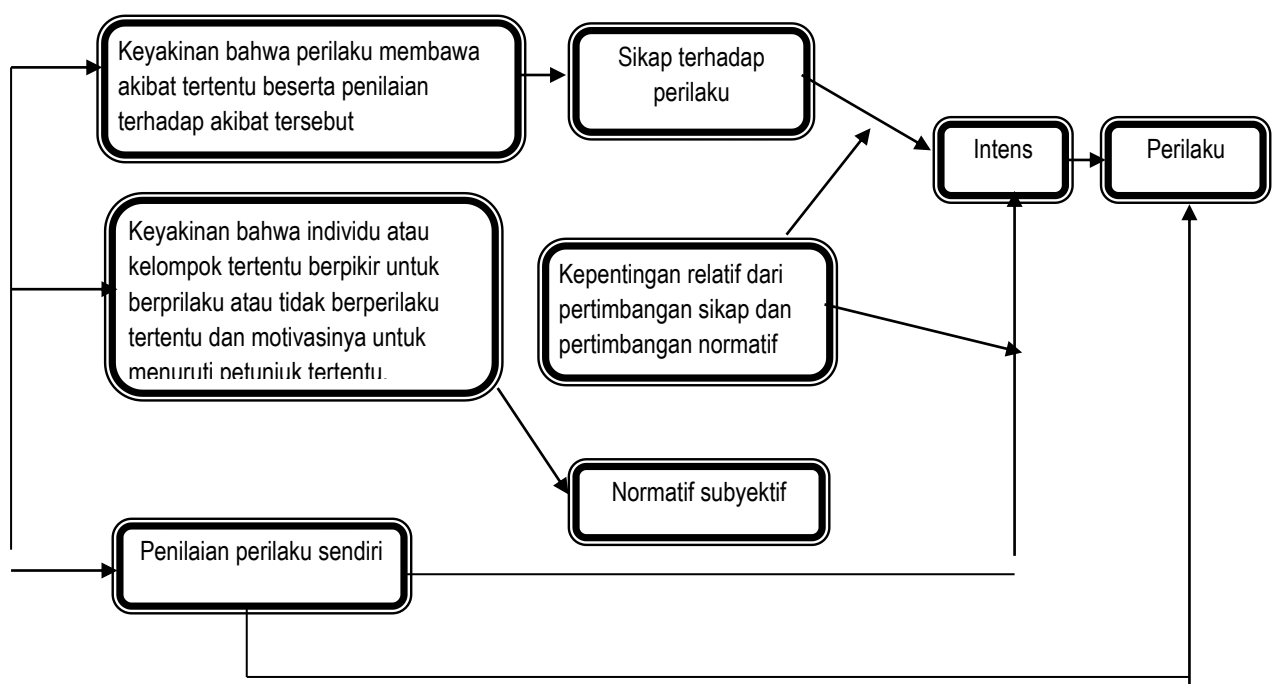
Dimensi-dimensi perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang telah dikemukakan, dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan perubahan pengetahuan ialah kesadaran, pengetahuan dan pemahaman dari penerima terhadap pesan-pesan komunikasi kampanye yaitu tentang pemeliharaan kebersihan lingkungan yang disampaikan oleh sumber.

Akibat adanya pesan-pesan tersebut, kemudian menimbulkan keinginan dan kemauan untuk menerima dan menggunakannya sehingga pada akhirnya direalisasikan dalam bentuk tindakan atau perilakunya nyata. Ini menunjukkan bahwa antara pengetahuan sikap dan perilaku mempunyai hubungan yang sangat erat.

Terjadi perubahan sikap terhadap suatu obyek berupa (ide, produk) sangat ditentukan oleh persepsi dan pendapat tentang obyek itu. Selanjutnya dengan adanya sikap akan berpengaruh kepada perubahan perilaku. Banyak psikologi sosial berasumsi bahwa diantara faktor-faktor lain, perilaku dipengaruhi oleh tujuan. Tujuan perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap seseorang, tetapi juga oleh

harapan lingkungan sosialnya terhadap perilaku tersebut, norma-norma subyektif serta kemampuannya dalam melakukan perilaku itu.

Berdasarkan asumsi di atas Ajzen dan Fishben dalam Ban dan Hawkins (1999:107) mengembangkan suatu cara baru untuk mempelajari sikap dengan menciptakan model “Tindakan Bernalar” (*Reasoning Action Theory*).



Gambar 2. 4 Model Intens Perilaku dari Ajzen dan Fishben
Sumber : Ban dan Hawkins (1999 : 107)

Model diatas menunjukkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh apa tujuan (intens) dari prilaku baginya. Tujuan prilaku sendiri dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku yang ditentukan oleh keyakinan akan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku; normasosial yaitu keyakinan akan adanya dukungan individu atau kelompok, dan penilaian akan kemampuannya sendiri dalam melakukan prilaku.

Dalam proses komunikasi, pembentukan perilaku bagi penerima pesan adalah hal yang sangat penting karena merupakan tujuan dari komunikasi kampanye. Penerima pesan-pesan komunikasi(target adaptor) dalam hal ini masyarakat, diarahkan agar tergugah dan memperoleh perhatian, sehingga pada akhirnya mereka dapat berpartisipasi secara nyata dalam pemeliharaan kesehatan.

Conyers (1994) mengemukakan beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting, yakni : (1) partisipasi merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya maka program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, (2) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk, dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, (3) merupakan suatu hak demokrat bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan pembangunan masyarakat itu sendiri. Hal ini selaras dengan konsep men-centred development, yaitu suatu konsep pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib masyarakat, dan tidak hanya sebagai alat pembangunan itu sendiri.

2.4 Konsep Pemberdayaan

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia yang berarti "*pemberdayaan*" adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Apabila kita ingin memahami konsep pemberdayaan secara tepat dan jernih memerlukan upaya

pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya (Mardikanto, 2012:

25). Lebih lanjut dijelaskan bahwa :

Konsep pemberdayaan (empowerment) mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kehadiran konsep pemberdayaan hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Kemudian disusul oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah frankfurt. Disamping itu bermunculan pula konsep-konsep seperti elite, kekuasaan, anti kemapanan (anti-establishment), gerakan populis, anti struktur, legitimasi, ideologi, pembebasan, dan civil society.

Konsep pemberdayaan lahir bersamaan dengan aliran-aliran yang muncul pada pertengahan abad ke-20 yang dikenal dengan aliran post-modernisme, yang menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada anti sistem, anti struktur, dan anti determinisme yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan.

Menurut Adisasmita (2011: 131) menjelaskan bahwa:

“pemberdayaan adalah sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparat, organisasi sosial masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kemunculan konsep pemberdayaan pada masa Eropa modern dijelaskan bahwa :

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat, dimana proses pemberdayaan dipandang sebagai depowerment dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer), kemudian digantikan dengan konsep baru yang memandang

manusia dan kemanusiaan (humanisme) sebagai landasan idiilnya, konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisme eksistensi manusia. Demikian juga, aliran neo-marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industri, kapitalisme, dan teknologi dengan alasan akan dapat mematikan manusia dan kemanusiaan, (Adisasmita, 2012: 133).

Sejalan dengan cita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya yang berpihak kepada manusia dan kemanusiaan, Parsons (dalam Zubaeda, 2013: 90) mengatakan :

Konsep power dalam masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif (misalnya, dalam pembangunan ekonomi). Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat dicapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (powerful).

Dalam konteks pembangunan, masyarakat dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga mereka mampu berperan sebagai subyek dalam pembangunan bukan sebagai objek dari pembangunan. Menurut Mardikanto (2012: 63) yang penting adalah memberikan “*power*” kepada yang “*powerless*”, karena hanya apabila memiliki power maka mereka akan dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi.

Dari pendapat tersebut, konsep pemberdayaan menekankan perlunya power dan keberpihakan kepada yang powerless untuk mengaktualisasikan eksistensi yang dimiliki oleh manusia sebagai individu dan masyarakat. Hal tersebut dipertegas oleh Mardikanto (2012: 61) yang mendefenisikan pemberdayaan dalam arti :

1. Diperlakukan sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar;
2. Diajak serta dalam proses pengambilan keputusan;

3. Melakukan pekerjaan yang menarik, menantang dan dengan identitas yang jelas;
4. Adanya kebebasan bertindak, menyusun rencana, menentukan sasaran, menyusun jadwal penyelesaian pekerjaan, menentukan sendiri cara penyelesaian masalah yang dihadapi; dan
5. Kesempatan mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi kemampuan operasional yang efektif.

Walaupun demikian, konsep pemberdayaan (*empowerment*) masih terlalu umum, sehingga di dalam mengaktualisasikan dan kemudian memprogramkan konsep pemberdayaan, harus menentukan sikap terlebih dahulu terhadap maksud dan arti kekuasaan (konsep dasar tentang kekuasaan) dan bagaimana membuat kekuasaan tersebut menjadi bagian serta fungsi dari aktualisasi eksistensi dan koeksistensi manusia, kalau perlu membudayakan konsep pemberdayaan tidak hanya secara individu akan tetapi juga secara kolektif, seperti yang disebutkan oleh Pranarka (Zubaeda, 2013: 72) yaitu :

Konsep pemberdayaan sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam semua bidang kehidupan.

Menurut Friedman (dalam Mardikanto, 2012: 75) konsep pemberdayaan ini disebut sebagai suatu konsep pembangunan alternatif yang dalam proses pembangunan menghendaki adanya *inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Merangkum dari konsep pemberdayaan yang telah diutarakan diatas, maka dalam konteks pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep

mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan, pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Adisasmita (2011: 129) mengemukakan bahwa :

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memberikan kekuatan lembaga, badan organisasi masyarakat agar mampu mengembangkan dirinya melalui bantuan, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat teknis melalui pendidikan dan pelatihan secara teratur

Sedangkan Rappaport (dalam Mardikanto, 2012: 73) menyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang.

Menurut Mardikanto (2012: 82) Keberdayaan dalam hubungannya dengan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan mikro dan makro. Dalam kerangka pemikiran tersebut berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Melihat dari pengertian pemberdayaan atau keberdayaan masyarakat, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat tersebut, karena keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Menurut Mardikanto (2012: 130)

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan maratabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

Ada tiga langkah dalam upaya memberdayakan masyarakat Mardikanto(2012: 132) sebagai berikut :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, dimana titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap individu, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam hal ini bukan hanya penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, dengan menanamkan nilai-nilai budaya modern- seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban, termasuk pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiaanya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Ketiga, melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Pendapat tersebut adalah senada dengan apa yang dikemukakan oleh Zubaeda (2013: 120) bahwa Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak terlepas dari

upaya memberdayakan masyarakat secara keseluruhan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya pemberdayaan diperlukan adanya percepatan proses perubahan struktural (*structure adjustment*) yang meliputi:

Perubahan (1) Dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, (2) Dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, (3) Dari Ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dan (4) Dari ketergantungan kepada kemandirian. Perubahan struktural tersebut mensyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Dari kedua pendapat itu, tercermin bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi, untuk itu perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena menyangkut diri dan masyarakat itu sendiri, hal ini dipertegas oleh Friedman (dalam Mardikanto, 2012: 105)

The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision-making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning.

Berkaitan dengan makna pentingnya proses pengambilan keputusan dalam pemberdayaan masyarakat, Adisasmita (2011: 133) mengartikan pemberdayaan adalah :

Proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Menurut Wasistiono dalam Mardikanto (2012: 81) dikatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan upaya transformasi, bahwa

Pemberdayaan adalah membuat upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dengan demikian inti pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian, baik dari individu, kelompok maupun masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat, penting untuk melihat sesuatu menurut sudut pandang mereka, bukan sudut pandang pemerintah, sehingga setiap individu dalam masyarakat merupakan sebuah entitas yang unik, yang memerlukan perlakuan secara khusus, kasus demi kasus, untuk itu pemberdayaan masyarakat haruslah dikaitkan dengan konsep perubahan yang bersifat makro, yakni dalam rangka membangun bangsa yang berkarakter (*nation and character building*).

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM-P2KP adalah sebagai komponen pengembangan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

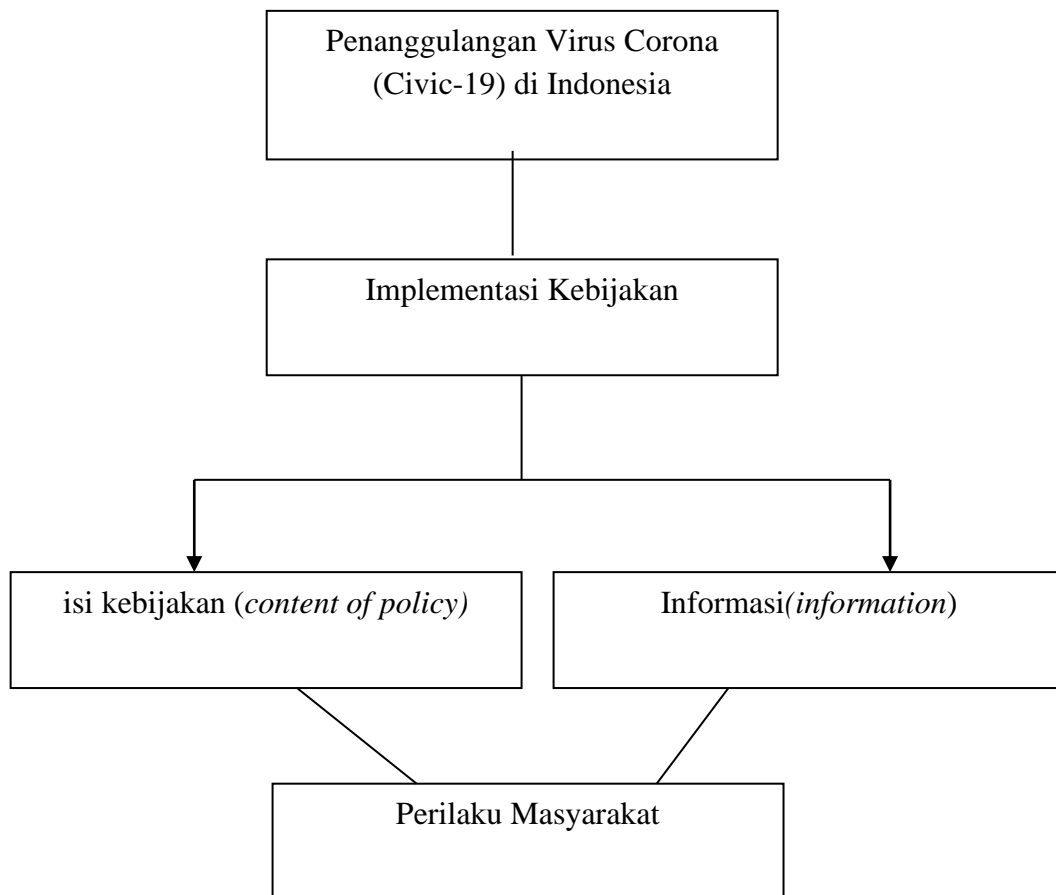
2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir berikut diadopsi dari Merse (Subarsono, 2008) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan Informasi (*information*).

Implementasi kebijakan dapat gagal karena; (1) samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak dapat terinci), sarana dan penentuan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada, (2) kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, (3) kadang-kadang perundang-undangan mempunyai begitu banyak lubang, sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-obyek kebijakan dapat mengelaknnya, hal mana dapat mematahkan semangat para pelaksana, (4) kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga manusia).

Kurangnya informasi dari para faktor terhadap ojek kebijakan dan struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan obyek dukungan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

Hipotesis Pertama

Ho = tidak ada pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

Ha = ada pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo.

Hipotesis Kedua

Ho = tidak ada pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo.

Ha = ada pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo.

Hipotesis Ketiga

Ho = tidak ada pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo.

Ha = ada pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka penelitian maka yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh yang nyata dan signifikan antara faktor-faktor yang berkaitan (seperti isi kebijakan (*content of policy*) dan informasi (*information*) jika di uji secara bersamaan terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Waktu penelitian direncanakan satu bulan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode observasional analitik dengan rancangan *Cross Sectional Study*, yaitu suatu rancangan penelitian yang mengkaji dinamika dan mengamati pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen pada saat bersamaan (*point time approach*).

3.2.2 Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yaitu Pengaruh isi kebijakan dan informasi, terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, maka definisi operasional variabel penelitian terdiri dari :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan

virus corona, yang mencakup beberapa variabel sebagai berikut :

a. Isi Kebijakan (X1) Variabel isi kebijakan ini mencakup :

Implementasi kebijakan dapat gagal karena; (1) samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan tidak dapat terinci), sarana dan penentuan prioritas, program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada, (2) kurangnya ketetapan intern dan ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan, (3) kadang-kadang perundang-undangan mempunyai begitu banyak lubang, sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-obyek kebijakan dapat mengelaknnya, hal mana dapat mematahkan semangat para pelaksana, (4) kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga manusia).

b. Informasi (X2), variabel lingkungan kebijakan mencakup :

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementators). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan public

agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

2. Perilaku Masyarakat

Robert Kwick dalam Soekidjo (2003) mengatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati. Selanjutnya dalam ensiklopedia Amerika mengartikan perilaku adalah suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Hal senada dikemukakan juga oleh Muller, (1996) bahwa perubahan perilaku adalah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan nyata. Terjadi perubahan perilaku biasanya di dahului atau dipengaruhi oleh perubahan sikap dan pengetahuan. Tetapi dalam hal tertentu, bisa juga terjadi sebaliknya.

3.2.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kepala keluarga yang ada di kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia antara 25 sampai 50 tahun sebanyak 3237 orang yang tersebar pada 5 keluarahan yaitu Leato Selatan, Leato Utara, Talumolo, Botu dan Bugis. (Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, 2019). Sedangkan Jumlah Sampel diambil dengan menggunakan rumus Taro Yamane dengan jumlah sampel 100 orang. Dari 100 orang tersebut akan mewakili setiap keluarahan yang ada di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

3.2.2 Jenis Data dan Variabel Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen atau kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

Penelitian ini terdiri atas delapan variabel, masing-masing terdiri atas tujuh variabel bebas dan satu variabel terikat sebagai berikut :

1. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel *dependent* adalah variabel yang nilainya tergantung dan dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variabel*) yang biasanya diberi notasi Y. Dalam penelitian ini yang dimaksud variabel *dependent* adalah perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

2. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan virus corona yang terdiri dari dua variabel bebas (X1 dan X2 yang dikategorikan sebagai berikut:

X1 = Informasi (information)

X2 = isi kebijakan (*content of policy*)

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

1. Teknik Kuesioner

Adalah teknik yang digunakan dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan kemudian dibagikan kepada semua responden untuk diisi dan dijawab sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dan melakukan pengkajian atas data sekunder, seperti uraian tugas pokok dan mekanisme pengurusan.

3. Observasi

Yaitu teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner, dengan melihat dan melakukan pengamatan langsung.

3.2.4 Prosedur Penelitian

Sebelum data yang didapat dianalisa lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan uji terhadap instrumen pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat, yaitu uji Validitas dan uji Reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana instrumen yang digunakan dapat betul-betul mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2011: 352). Metode yang digunakan adalah Korelasi *Product Moment* dengan cara mengkorelasikan skor jawaban pada setiap butir pertanyaan dengan skor total

$$r_{xy} = \frac{N \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Di mana :

r_{xy}	=	korelasi
X	=	skor jawaban setiap item
Y	=	skor total
n	=	jumlah subjek uji coba

2. Uji Reliabilitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui keajekan kuesioner yang diberikan kepada responden dan indeks yang diperoleh dari perhitungan menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan.

Menurut Sugiyono (2011: 354) Untuk uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua yang maksudnya adalah butir-butir instrumen dibagi menjadi dua kelompok yaitu butir-butir instrumen yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi satu dan butir instrumen nomor genap dikelompokkan menjadi satu. Kemudian masing-masing kelompok skor tiap butirnya dijumlahkan yang menghasilkan skor total. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach* dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\Sigma \sigma^2}{\sigma^2} \right]$$

Di mana :

r	=	Koefisien reliabilitas
k	=	Jumah butir pertanyaan

$\sigma_i^2 =$ varian butir pertanyaan

$\sigma^2 =$ varian skor tes

3.2.5 Konversi Data

Untuk mengukur variabel-variabel penelitian tersebut akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang disebarkan adalah data dalam bentuk skala ordinal, dan untuk menganalisa hasil penelitian ini maka peneliti perlu melakukan konversi data. Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval sering dijumpai pada saat melakukan analisis data, terutama data penelitian sosial.

Mentransformasi data ordinal menjadi data interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik setidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*). Menurut Riduwan (2012: 30) bahwa terdapat beberapa langkah transformasi data ordinal ke data interval sebagai berikut:

- a. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebarkan
- b. Pada setiap butir, tentukan berapa orang yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5 yang disebut sebagai frekuensi
- c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi
- d. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan proporsi secara berurutan perkolom skor
- e. Gunakan Tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh

- f. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan menggunakan Tabel Koordinat Kurva Normal
- g. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus

$$NS = \frac{DensityatLowerLimit) - (DensityatUpperLimit)}{(AreaBelowUpperLimit) - (AreaBelowLowerLimit)}$$

- h. Tentukan nilai transformasi dengan rumus

$$Y = NS + [1 + |NS_{min}|]$$

3.2.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Editing; memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang telah diterima dari responden. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan dan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan.
2. Koding; mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori, dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.
3. Tabulasi pekerjaan adalah pekerjaan membuat tabel jawaban. Jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan kedalam tabel.

Data primer dikumpulkan dari responden dengan memakai kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari pencatatan responden. Selanjutnya, setelah data terkumpul diberi kode dan dilakukan editing kemudian data dimasukkan dalam program pengolahan data SPSS.

Untuk menganalisa data agar sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisa Pengaruh isi kebijakan (*content of policy*) dan informasi(*information*) terhadap perilaku masyarakat maka analisa data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan informasi(*informasi*), dan perilaku masyarakat. Analisa ini menyederhanakan kumpulan data dari setiap variabel yang dijadikan informasi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase.

2. Analisis Bivariat

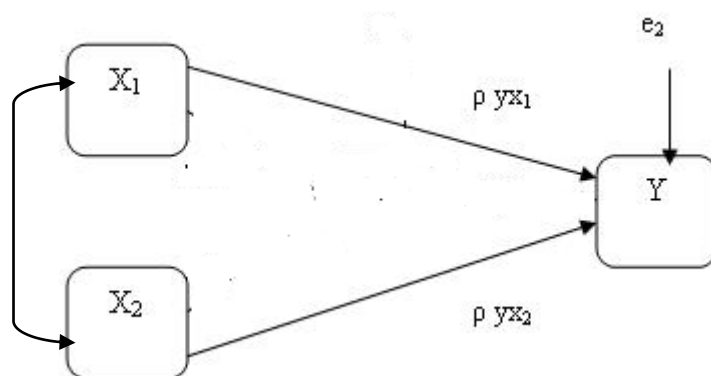
Analisis ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, sekaligus memunculkan uji statistik yang diperlukan. Untuk menguji hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan analisis korelasi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Interpretasi dari nilai korelasi adalah sebagai berikut :

Nilai r	Kriteria Hubungan
0	Tidak ada korelasi
0 – 0,5	Korelasi lemah
0,5 – 0,8	Korelasi sedang
0,8 – 1	Korelasi kuat
1	Korelasi sempurna

3. Analisis Multivariat

Analisis ini dilakukan dengan cara menghubungkan variabel independen yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan informasi (*information*) terhadap variabel dependent yaitu perilaku masyarakat, pada waktu yang bersamaan. Dari analisis multivariat ini dapat diketahui variabel-variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis jalur.

Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 dan X_2 terhadap Y . “Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung”. (Sugiyono, 2011: 297).



$$Y = p_{YX_1} X_1 + p_{YX_2} X_2 + e_2 \dots\dots\dots \text{Substruktural}$$

3.2.8 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian adalah kuesioner yang dihimpun dengan menggunakan daftar pertanyaan, dan setiap pertanyaan yang diajukan sebagai alat ukur dengan

teknik skala likert dengan 5 skala tingkat, kemudian dibagi menjadi 2 (Baik dan Tidak Baik) dengan pembobotan sebagai berikut :

1. Jawaban sangat baik diberi bobot 5
2. Jawaban baik diberi bobot 4
3. Jawaban cukup diberi bobot 3
4. Jawaban tidak baik diberi bobot 2
5. Jawaban sangat tidak baik diberi bobot 1

Setiap jawaban diberi skor numerik (angka), untuk melakukan kategorisasi variabel independen dan variabel dependen maka dilakukan perhitungan nilai akumulasi setiap responden. Frekuensi nilai jawaban tertinggi dan terendah dijumlah dan selanjutnya mencari nilai median untuk memperoleh kategori sangat baik, baik, cukup, tidak baik dan sangat tidak baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Dumbo Raya merupakan salah satu wilayah dari Kota Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone Bolango. Secara geografis mempunyai luas 8,67 km² atau 13,50 persen dari luas Kota Gorontalo. Kecamatan Dumbo Raya dibagi menjadi 5 kelurahan, yang terdiri dari 18 RW, dan 38 RT. Kelurahan Talumolo merupakan kelurahan yang memiliki wilayah terluas dengan luas wilayah 2,89 km² atau sekitar 33,33 persen dari luas wilayah Kecamatan Dumbo Raya.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Dumbo Raya memiliki batas-batas sebagai berikut, sebelah utara – Kecamatan Kota Selatan, sebelah timur – Kabupaten Bone Bolango, sebelah selatan – Teluk Tomini, dan sebelah barat – Kecamatan Hulonthalangi. Topografi kecamatan ini sebagian berupa dataran dan sebagian lereng/perbukitan. Jarak kantor kelurahan terjauh dengan ibukota kecamatan adalah 3,0 km.

Kecamatan Dumbo Raya beribukota di Kelurahan Talumolo. Kecamatan ini terdiri dari 5 kelurahan 18 Rukun Warga (RW), dan 38 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW dan RT terbanyak terdapat di Kelurahan Talumolo.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Variabel

1. Variabel Informasi X1

Dalam menjelaskan tentang variabel kriteria informasi, penulis menggunakan beberapa indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan alat pengumpulan data berupa kuesiner. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan SPSS versi 25 seperti yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.1 Frekuensi informasi tentang Covid			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0
	jarang	34	34,0
	sering	53	53,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 53 orang atau setara dengan 53% yang menyatakan bahwa sering mendapatkan informasi tentang Covid 19 pada media sosial, 34 orang atau 34% yang mengatakan jarang, dan 13 orang atau 13% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.2 Kontent atau isi berita Covid 19 pada media sosial jelas dipahami			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pahami	12	12,0
	Dipahami	28	28,0
	Sangat dipahami	60	60,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 60 orang atau setara dengan 60% yang menyatakan bahwa sangat memahami tentang Kontent atau isi berita Covid 19 pada media sosial jelas dipahami, 28 orang atau 28% yang mengatakan paham, dan 12 orang atau 12% yang menyatakan tidak paham.

Tabel 4.3 Informasi tentang Covid 19 pada media sosial secara umum sesuai dengan informasi yang dibutuhkan tentang Covid 19			
		Frequency	Percent
Valid	tidak sesuai	11	11,0
	Sesuai	36	36,0
	Sangat sesuai	53	53,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 53 orang atau setara dengan 53% yang menyatakan bahwa Informasi tentang Covid 19 pada media sosial secara umum sesuai dengan informasi yang dibutuhkan tentang Covid 19 sangat sesuai, 36 orang atau 36% yang mengatakan sesuai, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak sesuai

Tabael 4.4 Informasi tentang Covid 19 pada media sosial secara umum Bermanfaat dalam informasi kesehatan			
		Frequency	Percent
Valid	tidak bermanfaat	10	10,0
	Bermanfaat	26	26,0
	Sangat bermanfaat	64	64,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 64 orang atau setara dengan 64% yang menyatakan bahwa Informasi tentang Covid 19 pada media sosial secara umum Bermanfaat dalam memberikan informasi kesehatan sangat bermanfaat, 26 orang atau 26% yang mengatakan bermanfaat, dan 10 orang atau 10% yang menyatakan tidak bermanfaat.

Tabel 4.5 Informasi tentang Covid 19 pada media sosial pada umumnya adalah informasi yang ter up-date artinya informasi tersedia tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan			
		Frequency	Percent
Valid	tidak sesuai	11	11,0
	Sesuai	30	30,0
	Sangat sesuai	59	59,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 59 orang atau setara dengan 59% yang menyatakan bahwa Informasi tentang Covid 19 pada media sosial pada umumnya adalah informasi yang ter up-date artinya informasi tersedia tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan sangat sesuai, 30 orang atau 30% yang mengatakan sesuai, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak sesuai.

Tabel 4.6 Dari sudut Keandalan, Informasi tentang Covid 19 pada media sosial benar-benar dapat dipercaya keberadaannya sehingga terjamin kebenarannya			
		Frequency	Percent
Valid	tidak dipercaya	9	9,0
	Dipercaya	39	39,0
	Sangat dipercaya	52	52,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 52 orang atau setara dengan 52% yang menyatakan bahwa Dari sudut Keandalan, Informasi tentang Covid 19 pada media sosial benar-benar dapat dipercaya keberadaannya sehingga terjamin kebenarannya sangat dipercaya, 39 orang atau 39% yang mengatakan dipercaya, dan 9 orang atau 9% yang menyatakan tidak dipercaya.

Tabel 4.7 Dari aspek Konsistensi, Informasi tentang Covid 19 pada media sosial tidak mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya			
		Frequency	Percent
Valid	tidak konsisten	8	8,0
	Konsisten	28	28,0
	Sangat konsisten	64	64,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 64 orang atau setara dengan 64% yang menyatakan bahwa Dari aspek Konsistensi, Informasi tentang Covid 19 pada media sosial tidak mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya sangat konsisten, 28 orang atau 28% yang mengatakan konsisten, dan 8 orang atau 8% yang menyatakan tidak konsisten.

Tabel 4.8 Dari sisi Kejelasan, Informasi tentang Covid 19 pada media sosial bebas dari keraguraguan dan harus jelas keberadaannya			
		Frequency	Percent
Valid	tidak jelas	14	14,0
	Jelas	43	43,0
	Sangat jelas	43	43,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 43 orang atau setara dengan 43% yang menyatakan bahwa Dari sisi Kejelasan, Informasi tentang Covid 19 pada media sosial bebas dari keraguraguan dan harus jelas keberadaannya sangat jelas, 43 orang atau 43% yang mengatakan jelas, dan 14 orang atau 14% yang menyatakan tidak jelas.

Tabel 4.9 Informasi tentang Covid 19 pada media sosialpada umumnya lengkap dan utuh untuk kepentingan kegiatan tertentu			
		Frequency	Percent
Valid	tidak lengkap	13	13,0
	Lengkap	33	33,0
	Sangat lengkap	54	54,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 54 orang atau setara dengan 54% yang menyatakan bahwa Informasi tentang Covid 19 pada media sosialpada umumnya lengkap dan utuh untuk kepentingan kegiatan tertentu sangat lengkap, 33 orang atau 33% yang mengatakan lengkap, dan 13 orang atau 13% yang menyatakan tidak lengkap.

Tabel 4.10 Informasi tentang Covid 19 pada media sosial asli dan tidak mengada-ada			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0
	Jarang	31	31,0
	Sering	58	58,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 58 orang atau setara dengan 58% yang menyatakan bahwa sering Informasi tentang Covid 19 pada media sosial asli dan tidak mengada-ada, 31 orang atau 31% yang mengatakan jarang, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak pernah.

2. Variabel Isi Kebijakan (X2)

Dalam menjelaskan tentang variabel isi kebijakan, penulis menggunakan beberapa indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan alat pengumpulan data berupa kuesiner. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan SPSS versi 25 seperti yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 isi kebijakan tentang Covid 19 tidak terstruktur dengan jelas			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0
	jarang	41	41,0
	sering	45	45,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 45 orang atau setara dengan 45% yang menyatakan bahwa sering isi kebijakan tentang Covid 19 tidak terstruktur dengan jelas, 41 orang atau 41% yang mengatakan jarang, dan 14 orang atau 14% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.12 Informasi tentang kebijakan covid 19 bertentangan antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya

		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0
	jarang	27	27,0
	sering	60	60,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 60 orang atau setara dengan 60% yang menyatakan bahwa sering Informasi tentang kebijakan covid 19 bertentangan antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya, 27 orang atau 27% yang mengatakan jarang, dan 13 orang atau 13% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.13 Kebijakan tentang Covid 19 di dukung oleh pemerintah setempat

		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0
	jarang	31	31,0
	sering	58	58,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 58 orang atau setara dengan 58% yang menyatakan bahwa sering Kebijakan tentang Covid 19 di dukung oleh pemerintah setempat, 31 orang atau 31% yang mengatakan jarang, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.14 kebijakan pemerintah tentang Covid 19 di dukung oleh sarana dan prasarana lainnya			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0
	jarang	30	30,0
	sering	55	55,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 55 orang atau setara dengan 55% yang menyatakan bahwa sering kebijakan pemerintah tentang Covid 19 di dukung oleh sarana dan prasarana lainnya, 30 orang atau 30% yang mengatakan jarang, dan 15 orang atau 15% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.15 kebijakan pemerintah tentang Covid 19 dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0
	jarang	22	22,0
	sering	63	63,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 63 orang atau setara dengan 63% yang menyatakan bahwa sering kebijakan pemerintah tentang Covid 19 dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, 22 orang atau 22% yang mengatakan jarang, dan 15 orang atau 15% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.16 Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 tidak memiliki celah yang dapat merugikan masyarakat			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	9	9,0
	jarang	39	39,0
	sering	52	52,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 52 orang atau setara dengan 52% yang menyatakan bahwa sering Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 tidak memiliki celah yang dapat merugikan masyarakat, 39 orang atau 39% yang mengatakan jarang, dan 9 orang atau 9% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.17 Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 sangat memotivasi gugus tugas dalam melaksanakan tugasnya			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	8	8,0
	jarang	28	28,0
	sering	64	64,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 64 orang atau setara dengan 64% yang menyatakan bahwa sering Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 sangat memotivasi gugus tugas dalam melaksanakan tugasnya, 28 orang atau 28% yang mengatakan jarang, dan 8 orang atau 8% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.18 Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 memperhatikan kondisi sosial masyarakat			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0
	jarang	43	43,0
	sering	43	43,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 43 orang atau setara dengan 43% yang menyatakan bahwa sering Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 memperhatikan kondisi sosial masyarakat, 43 orang atau 43% yang mengatakan jarang, dan 14 orang atau 14% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.19 Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 didukung oleh semua elemen yang bertugas dalam gugus Covid 19			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0
	jarang	33	33,0
	sering	54	54,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2019

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 54 orang atau setara dengan 54% yang menyatakan bahwa sering Kebijakan pemerintah tentang Covid 19 didukung oleh semua elemen yang bertugas dalam gugus Covid 19, 33 orang atau 33% yang mengatakan jarang, dan 13 orang atau 13% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.20 pemerintah dalam hal ini satuan tugas gugus telah melakukan koordinasi tentang Covid 19

		Frequency	Percent
Valid	tidak jelas	11	11,0
	Kurang jelas	31	31,0
	Jelas	58	58,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 58 orang atau setara dengan 58% yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini satuan tugas gugus telah melakukan koordinasi tentang Covid 19, 31 orang atau 31% yang mengatakan kurang jelas, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak jelas.

3. Variabel Perilaku Masyarakat (Y)

Dalam menjelaskan tentang variabel perilaku masyarakat, penulis menggunakan beberapa indikator pertanyaan yang diberikan kepada responden dengan alat pengumpulan data berupa kuesiner. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan SPSS versi 25 seperti yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.21 Distribusi Responden tentang ketertarikan dengan isu Covid 19

		Frequency	Percent
Valid	tidak tertarik	11	11,0
	Tertarik	36	36,0
	Sangat tertarik	53	53,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 53 orang atau setara dengan 53% yang menyatakan bahwa sangat tertarik dengan isi atau pemberitaan Covid 19, 36 orang atau 36% yang mengatakan tertarik, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak tertarik.

Tabel 4.22 Distribusi Responden tentang mengikuti berita tentang isu Covid 19			
		Frequency	Percent
Valid	tidak tertarik	11	11,0
	Tertarik	20	20,0
	Sangat tertarik	69	69,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.22 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 69 orang atau setara dengan 69% yang menyatakan bahwa sangat tertarik dengan mengikuti berita tentang Covid 19, 20 orang atau 20% yang mengatakan tertarik, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak tertarik.

Tabel 4.23 Distribusi Responden tentang keaktifan dalam mendiskusikan masalah-masalah Covid 19			
		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0
	jarang	41	41,0
	sering	45	45,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.23 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 45 orang atau setara dengan 45% yang menyatakan bahwa sering mendiskusikan masalah-masalah Covid 19, 41 orang atau 41% yang mengatakan jarang, dan 14 orang atau 14% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4. 24 Distribusi Responden tentang keaktifan untuk menghadiri kampanye atau sosialisasi tentang Covid 19

		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0
	jarang	27	27,0
	sering	60	60,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.24 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 60 orang atau setara dengan 60% yang menyatakan bahwa sering aktif untuk menghadiri kampanye atau sosialisasi tentang Covid 19, terdapat 27 orang atau 27% yang mengatakan jarang, dan 13 orang atau 13% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.25 Distribusi Responden tentang perilaku untuk meyakinkan orang lain tentang menggunakan alat pelindung diri yang dianjurkan

		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0
	jarang	31	31,0
	sering	58	58,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.25 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 58 orang atau setara dengan 58% yang menyatakan bahwa sering meyakinkan orang lain tentang menggunakan alat pelindung diri yang dianjurkan, 31 orang atau 31% yang mengatakan jarang, dan 11 orang atau 11% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.26 Distribusi Responden tentang membantu atau bekerja dalam mengkampanyekan tentang bahaya Covid 19

		Frequency	Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0
	jarang	30	30,0
	sering	55	55,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.26 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 55 orang atau setara dengan 55% yang menyatakan bahwa sering membantu atau bekerja dalam mengkampanyekan tentang bahaya Covid 19, terdapat 30 orang atau 30% yang mengatakan jarang, dan 15 orang atau 15% yang menyatakan tidak pernah.

Tabel 4.27 Distribusi Responden tentang perilaku untuk mengikuti anjuran pemerintah dalam hal ini gugur tugas

		Frequency	Percent
Valid	tidak adil	15	15,0
	Adil	22	22,0
	Sangat adil	63	63,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.27 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 63 orang atau setara dengan 63% yang menyatakan bahwa Secara umum, mengikuti anjuran pemerintah dalam hal ini gugur tugas, 22 orang atau 22% yang mengatakan adil, dan 15 orang atau 15% yang menyatakan tidak adil.

Tabel 4.28 Distribusi Responden tentang informasi dari media sosial juga dijadikan landasan dalam mendapatkan informasi tentang covid 19

		Frequency	Percent
Valid	tidak yakin	16	16,0
	Yakin	29	29,0
	Sangat yakin	55	55,0
	Total	100	100,0

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS ver 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.28 diatas dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden, terdapat 55 orang atau setara dengan 55% yang menyatakan sangat yakin bahwa informasi dari media sosial juga dijadikan landasan dalam mendapatkan informasi tentang covid 19, terdapat 29 orang atau 29% yang mengatakan yakin, dan 13 orang atau 13% yang menyatakan tidak yakin.

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana instrumen yang digunakan dapat betul-betul mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2008). Metode yang digunakan adalah Korelasi *Product Moment* dengan cara mengkorelasikan skor jawaban pada setiap butir pertanyaan dengan skor total. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (lihat lampiran) instrumen variabel X1, X2 dan Y adalah valid karena nilai R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} .

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua yang maksudnya adalah butir-butir instrumen dibagi menjadi dua kelompok yaitu butir-butir instrumen yang bernomor ganjil dikelompokkan menjadi satu dan butir instrumen nomor genap dikelompokkan menjadi satu.

Kemudian masing-masing kelompok skor tiap butirnya dijumlahkan yang menghasilkan skor total. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya. Hasil penelitian menunjukkan (lihat lampiran) instrumen variabel X1, X2 dan Y mempunyai korelasi positif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Uji Hipotesis Pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42,516 dan nilai F_{tabel} 3.09, dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

Tabel 4.29 Uji Hipotesis antara Variabel X1 dan X2 terhadap Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	254,508	2	127,254	42,516	,000 ^b
	Residual	290,332	97	2,993		
	Total	544,840	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Sumber : Hasil Olahan data SPSS vers 25, 2021

Kesimpulan dapat diperoleh dari hasil analisis tersebut bahwa Informasi (X₁) dan isi kebijakan (X₂) berpengaruh secara simultan terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara simultan antara Informasi (X₁) dan isi kebijakan (X₂) terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan

Dumbo Raya Kota Gorontalo. dapat dilihat pada nilai R Square pada tabel berikut ini.

Tabel 4.30 Pengaruh Variabel X1 dan X2 terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics	
					R Square Change	F Change
1	,683 ^a	,467	,456	1,73006	,467	42,516

Sumber : Hasil Olahan data SPSS vers 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Informasi (X_1) dan isi kebijakan (X_2) terhadap terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sebesar 0,456 atau 45,6% dan sisanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

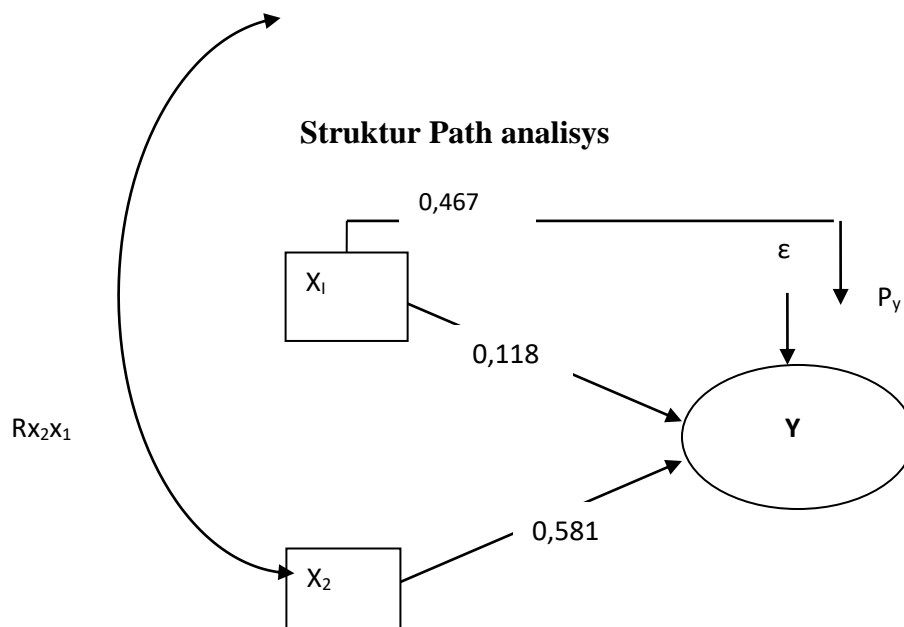
$$e = 1 - R^2$$

$$e = 1 - 0,456$$

$$e = 0,544$$

Angka 54,4% di atas menunjukkan bahwa besarnya faktor lain dalam model diluar kedua variabel independen exogenous di atas. Dengan kata lain variabel perilaku pemilih dapat diterangkan dengan menggunakan variabel-variabel independen exogenous berupa bahwa Informasi (X_1) dan isi kebijakan (X_2) sebesar 45,6%. Sedang sisanya sebesar 54,4% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Setelah melakukan perhitungan, maka selanjutnya penulis membuat diagram jalur dari model path analisis. Adapun diagram jalurnya adalah sebagai berikut;



Dengan demikian persamaan analisisnya adalah

$$Y = 0,118X_1 + 0,467X_2 + \epsilon$$

4.3.2 Pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui Informasi (X1) terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo

Besarnya pengaruh variabel independen exogenous Kriteria informasi (X_1) terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo secara sendiri-sendiri/ parsial dapat dilihat dari nilai Beta atau *Standardized Coefficient* di bawah ini. Sedangkan untuk pengujian hipotesisnya digunakan nilai t. Angka-angka tersebut dapat dilihat di tabel Coefficient di bawah ini

Tabel 4.31 Pengaruh X1 terhadap Y

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	9,138	1,768		5,170	,000	5,630	12,646
	X1	,113	,130	,118	,869	,387	-,146	,372
	X2	,520	,122	,581	4,262	,000	,278	,762

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Olahan data SPSS vers 25, 2021

Untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen exogenous independen exogenous informasi (X_1) terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dapat dilakukan langkah-langkah analisis dengan menentukan hipotesis yang akan diuji seperti dibawah ini :

H0: tidak ada pengaruh antara informasi (X_1) secara parsial terhadap perilaku masyarakat pada Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo.

H1: ada pengaruh antara terpaan informasi Informasi (X_1) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo

Nilai t hasil perhitungan IBM SPSS yang tertera dalam kolom t pada tabel Coeffecient di atas untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel independen exogenous informasi (X_1) terhadap variabel endogenous perilaku masyarakat ialah sebesar 0,118 atau 11,8%

Hasil perhitungan dengan IBM SPSS menunjukkan angka t hitung sebesar $0,869 < t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,660; dengan demikian keputusannya ialah H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara informasi (X_1) secara parsial terhadap perilaku pemilih masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota

Gorontalo. Pengaruh sebesar ini tidak signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil perhitungan yang tertera dalam kolom Sig sebesar $0,387 > 0,05$.

4.3.3 Pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Besarnya pengaruh variabel independen exogenous isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo secara sendiri-sendiri/ parsial dapat dilihat dari nilai Beta atau *Standardized Coefficient* di bawah ini. Sedang untuk pengujian hipotesisnya digunakan nilai t. Angka-angka tersebut dapat dilihat di tabel Coefficient di bawah ini

Tabel 4.32 Pengaruh X2 terhadap Y

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	9,138	1,768		5,170	,000	5,630	12,646
	X1	,113	,130	,118	,869	,387	-,146	,372
	X2	,520	,122	,581	4,262	,000	,278	,762
a. Dependent Variable: Y								

Sumber : Hasil Olahan data SPSS vers 25, 2021

Untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen exogenous independen exogenous isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat (Y) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dapat dilakukan langkah-langkah analisis dengan menentukan hipotesis yang akan diuji seperti dibawah ini :

H0: tidak ada pengaruh antara isi kebijakan (X2) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

H1: ada pengaruh antara isi kebijakan (X2) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Nilai t hasil perhitungan IBM SPSS yang tertera dalam kolom t pada tabel Coefficient di atas untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel independen exogenous isi kebijakan (X₂) terhadap variabel endogenous perilaku masyarakat ialah sebesar 0,581 atau 58,1%

Hasil perhitungan dengan IBM SPSS menunjukkan angka t_{hitung} sebesar 4,262 > t_{tabel} sebesar 1,660; dengan demikian keputusannya ialah H0 ditolak dan H1 diterima . Artinya ada pengaruh antara isi kebijakan (X2) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Pengaruh sebesar ini signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil perhitungan yang tertera dalam kolom Sig sebesar $0,000 < 0,05$.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tabulasi data dan analisis data, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona berupa Informasi (X_1) dan isi kebijakan (X_2) secara simultan terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42,516 dan nilai F_{tabel} 3.09, dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Dengan demikian variabel perilaku masyarakat dapat diterangkan dengan menggunakan variabel-variabel independen exogenous berupa Informasi (X_1) dan isi kebijakan (X_2) sebesar 45,6%. Sedangkan sisanya sebesar 54,4% disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.
2. Tidak Terdapat pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona berupa Informasi (X_1) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Nilai t hasil perhitungan IBM SPSS yang tertera dalam kolom t pada tabel Coefficient di atas untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel independen exogenous informasi (X_1) terhadap variabel endogenous perilaku pemilih ialah sebesar 0,118 atau 11,8%. angka t_{hitung} sebesar $0,869 < t_{tabel}$ sebesar 1,660; dengan

demikian keputusannya ialah H_0 diterima dan H_1 ditolak . Artinya tidak ada pengaruh antara implementasi kebijakan penaggulangan virus corona berupa Informasi (X_1) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo. Pengaruh sebesar ini tidak signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil perhitungan yang tertera dalam kolom Sig sebesar $0,387 > 0,05$.

3. Terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan penaggulangan virus corona berupa isi kebijakan (X_2) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo. Nilai t hasil perhitungan IBM SPSS yang tertera dalam kolom t pada tabel Coefficient di atas untuk menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel independen exogenous isi kebijakan (X_2) terhadap variabel endogenous perilaku masyarakat ialah sebesar 0,581 atau 58,1%. Hasil perhitungan menunjukkan angka t_{hitung} sebesar $4,262 > t_{tabel}$ sebesar 1,660; dengan demikian keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_1 diterima . Artinya ada pengaruh antara implementasi kebijakan penaggulangan virus corona berupa isi kebijakan (X_2) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo RayaKota Gorontalo. Pengaruh sebesar ini signifikan karena nilai signifikansi/probabilitas hasil perhitungan yang tertera dalam kolom Sig sebesar $0,000 < 0,05$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data kesimpulan dalam penelitian, terdapat beberapa saran dalam penelitian ini.

1. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terpaan informasi melalui media sosial merupakan salah satu indikator penting dalam mempengaruhi masyarakat terhadap isu covid 19. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini satuan gugus tugas sebaiknya memperhatikan media sosial sebagai salah medium dalam menyampaikan pesan.
2. Dari dua sub variabel dalam implementasi kebijakan penanggulangan virus corona berupa (Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2), variabel isi kebijakan paling dominan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian isi kebijakan dapat dijadikan pertimbangan dalam mendesain pesan melalui media sosial. Sumber informasi dapat berupa aktor atau komunikator secara personal maupun secara kelompok bahkan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ali, Faried dkk. 2012. Studi Analisa Kebijakan. Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Refika Aditama. Bandung.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama. Bandung.
- Mardikanto, Tatok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. Pemberdayaan Masyarakat. Alfabeta. Bandung.
- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. (mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik. Refika Aditama. Bandung.
- Solichin, Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara. Jakarta.
- Subarsono, A.G. 2008. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugoyono. 2011. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Suripto, Chabib Soleh. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Model-model Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun, dan Laporan Pelaksanaan APBD. Fokusmedia. Bandung.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta.
- Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek. Kencana. Jakarta.

DOKUMEN :

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007.
- Materi Lokakarya Kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan, 2007.

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2008.

Pedoman Teknis Pendaftaran Relawan dan Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat, 2004.

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat, 2004.

Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007.

Master tabel

Variabel X1

Responden	Nilai Jawaban Responden										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	3	3	3	2	1	3	3	1	3	25
2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	26
3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	26
4	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	23
5	2	2	3	2	2	2	2	2	3	1	21
6	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	20
7	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2	26
8	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	27
9	3	3	2	1	3	3	3	1	3	1	23
10	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	27
11	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	28
12	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	28
13	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	27
14	3	2	3	3	1	3	3	3	2	3	26
15	3	3	3	2	3	3	2	1	1	3	24
16	1	3	2	2	3	2	3	2	3	3	24
17	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	26
18	3	3	2	3	3	2	3	3	3	1	26
19	3	3	2	3	2	3	3	1	3	2	25
20	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	26
21	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	26
22	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	24
23	3	1	2	3	2	2	3	3	3	3	25
24	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	26
25	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	27
26	2	2	2	3	1	3	3	2	2	2	22
27	1	2	3	3	2	2	1	3	2	3	22
28	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	24
29	1	3	3	2	3	3	2	3	3	3	26
30	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	21
31	3	2	3	3	3	1	1	2	1	1	20
32	2	3	3	2	2	2	2	1	3	3	23
33	3	3	3	3	3	2	3	3	1	3	27
34	2	2	2	1	3	3	3	2	2	2	22

35	3	2	3	3	1	3	2	3	2	3	25
36	3	3	3	1	3	3	2	1	1	3	23
37	1	3	1	2	3	1	3	2	2	3	21
38	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	27
39	3	3	2	3	3	2	3	3	3	1	26
40	3	3	2	3	3	3	3	1	3	2	26
41	2	1	1	3	3	3	3	2	3	3	24
42	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
43	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	24
44	3	1	3	3	2	2	3	3	3	3	26
45	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	25
46	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
47	2	2	2	3	1	3	3	2	2	2	22
48	2	2	3	2	2	2	1	3	2	3	22
49	3	2	1	2	3	3	2	2	2	2	22
50	1	3	3	2	3	3	2	3	2	3	25
51	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	23
52	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	26
53	3	3	3	1	2	3	2	2	2	2	23
54	1	3	1	2	3	1	1	2	1	1	16
55	2	2	3	3	2	3	2	1	1	3	22
56	2	3	2	2	3	1	3	2	3	3	24
57	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	26
58	2	1	1	3	3	2	3	3	3	1	22
59	3	3	3	3	2	3	3	1	3	2	26
60	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	26
61	3	1	3	3	1	2	3	3	3	3	25
62	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	26
63	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
64	2	2	2	3	1	3	3	2	3	2	23
65	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	25
66	3	2	1	2	3	3	3	2	2	2	23
67	1	3	3	2	3	2	1	3	2	3	23
68	3	1	3	1	2	3	2	3	2	2	22
69	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
70	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2	23
71	3	3	3	3	3	1	1	2	1	1	21
72	2	2	2	1	3	2	3	1	3	3	22
73	3	2	3	3	1	2	3	3	1	3	24

74	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	25
75	1	3	1	2	3	3	3	3	2	3	24
76	2	3	3	3	3	3	2	1	1	3	24
77	3	3	2	3	3	1	3	2	3	3	26
78	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	27
79	2	1	1	3	3	2	3	3	3	1	22
80	3	3	3	3	2	3	3	1	3	2	26
81	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	26
82	3	1	3	3	1	2	3	3	3	3	25
83	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	26
84	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
85	2	2	2	3	1	3	3	2	3	2	23
86	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	25
87	3	2	1	2	3	3	3	2	2	2	23
88	1	3	3	2	3	2	1	3	2	3	23
89	3	1	3	1	2	3	2	3	2	2	22
90	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
91	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	26
92	2	2	2	1	3	1	1	2	1	1	16
93	3	2	3	3	1	2	3	3	1	3	24
94	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	25
95	1	3	1	2	3	3	3	3	2	3	24
96	2	3	3	3	3	3	2	1	1	3	24
97	3	3	2	3	3	1	3	2	3	3	26
98	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	27
99	2	1	1	3	3	2	3	3	3	1	22
100	3	3	3	3	2	3	3	1	3	2	26

Variabel X2

Responden	Nilai Jawaban Responden										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3	1	3	3	3	1	3	3	1	3	24
2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	27
3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	25
4	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	23
5	2	3	1	2	2	2	2	2	3	1	20
6	1	2	2	2	1	2	3	1	2	2	18
7	3	3	2	1	3	3	2	3	3	2	25
8	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	28
9	1	3	1	3	3	3	3	1	3	1	22
10	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
11	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	28
12	3	3	3	3	1	3	2	3	3	3	27
13	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	28
14	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	27
15	1	1	3	3	3	3	2	1	1	3	21
16	2	3	3	1	3	2	3	2	3	3	25
17	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	25
18	3	3	1	3	3	2	3	3	3	1	25
19	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	24
20	2	3	3	2	1	3	3	2	3	3	25
21	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	28
22	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	24
23	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	27
24	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	25
25	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	28
26	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	22
27	3	2	3	1	2	2	1	3	2	3	22
28	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	24
29	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	27
30	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	20
31	2	1	1	3	3	1	1	2	1	1	16
32	1	3	3	2	3	2	2	1	3	3	23
33	3	1	3	3	3	2	3	3	1	3	25
34	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	22
35	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	26

36	1	1	3	3	3	3	2	1	1	3	21
37	2	3	3	1	3	1	3	2	2	3	23
38	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	26
39	3	3	1	3	3	2	3	3	3	1	25
40	1	3	2	3	3	3	3	1	3	2	24
41	2	3	3	2	1	3	3	2	3	3	25
42	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
43	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	24
44	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	27
45	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	24
46	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
47	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	22
48	3	2	3	1	2	2	1	3	2	3	22
49	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	23
50	3	3	3	1	3	3	2	3	2	3	26
51	2	2	2	3	1	3	2	2	2	3	22
52	2	1	1	3	3	2	2	3	3	3	23
53	1	1	3	3	3	3	2	2	2	2	22
54	2	3	3	1	3	1	1	2	1	1	18
55	2	3	3	2	3	3	2	1	1	3	23
56	3	3	1	3	3	1	3	2	3	3	25
57	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	25
58	2	3	3	2	1	2	3	3	3	1	23
59	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	27
60	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	26
61	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	27
62	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	25
63	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
64	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	23
65	3	2	3	1	2	2	3	3	3	3	25
66	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	24
67	3	3	3	1	3	2	1	3	2	3	24
68	2	2	2	3	1	3	2	3	2	2	22
69	2	1	1	3	3	3	2	3	3	3	24
70	1	3	3	2	3	3	2	2	2	2	23
71	3	1	3	3	3	1	1	2	1	1	19
72	2	2	2	2	2	2	3	1	3	3	22
73	3	2	3	3	2	2	3	3	1	3	25
74	1	1	3	3	3	3	3	2	2	2	23

75	2	3	3	1	3	3	3	3	2	3	26
76	2	3	3	2	3	3	2	1	1	3	23
77	3	3	1	3	3	1	3	2	3	3	25
78	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	25
79	2	3	3	2	1	2	3	3	3	1	23
80	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	27
81	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	26
82	3	3	3	3	1	2	3	3	3	3	27
83	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	25
84	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
85	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	23
86	3	2	3	1	2	2	3	3	3	3	25
87	3	2	2	3	2	3	3	2	2	2	24
88	3	3	3	1	3	2	1	3	2	3	24
89	2	2	2	3	1	3	2	3	2	2	22
90	2	1	1	3	3	3	2	3	3	3	24
91	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	24
92	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	16
93	3	2	3	3	2	2	3	3	1	3	25
94	1	1	3	3	3	3	3	2	2	2	23
95	2	3	3	1	3	3	3	3	2	3	26
96	2	3	3	2	3	3	2	1	1	3	23
97	3	3	1	3	3	1	3	2	3	3	25
98	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	25
99	2	3	3	2	1	2	3	3	3	1	23
100	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	27

Variabel Y

Responden	Nilai Jawaban Responden										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	1	24
2	3	1	3	3	2	3	3	1	2	3	24
3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	26
4	2	2	2	2	3	3	2	2	1	3	22
5	2	2	2	3	1	2	2	3	2	2	21
6	2	3	1	2	2	2	1	2	2	2	19
7	3	2	3	3	2	1	3	3	2	3	25
8	3	1	3	3	3	2	3	3	3	2	26
9	3	3	1	3	1	3	3	1	1	3	22
10	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	26
11	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	28
12	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	26
13	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	27
14	3	3	3	2	3	3	2	3	3	1	26
15	3	2	1	1	3	3	3	3	1	3	23
16	1	3	2	3	3	1	3	1	2	3	22
17	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	27
18	2	3	3	3	1	3	3	2	3	3	26
19	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	26
20	3	3	2	3	3	2	1	1	3	3	24
21	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	28
22	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	25
23	2	3	3	3	3	3	1	3	3	1	25
24	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	26
25	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
26	3	3	2	2	2	2	2	2	3	1	22
27	2	1	3	2	3	1	2	3	3	2	22
28	3	2	3	2	2	3	2	1	2	3	23
29	3	2	3	3	3	1	3	3	2	3	26
30	3	2	2	2	2	3	1	3	1	2	21
31	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	21
32	2	3	1	3	3	2	3	3	2	2	24
33	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	27
34	3	3	2	2	2	2	2	2	1	3	22
35	3	3	3	2	3	3	2	3	3	1	26

36	3	2	1	1	3	3	3	3	1	3	23
37	1	3	2	3	3	1	3	1	2	3	22
38	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	27
39	2	3	3	3	1	3	3	2	3	3	26
40	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	26
41	3	3	2	3	3	2	1	1	3	3	24
42	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	28
43	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	25
44	2	3	3	3	3	3	1	3	3	1	25
45	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	26
46	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
47	3	3	2	2	2	2	2	2	3	1	22
48	2	1	3	2	3	1	2	3	3	2	22
49	3	2	3	2	2	3	2	1	2	3	23
50	2	2	3	3	3	1	3	3	2	3	25
51	3	2	2	2	2	3	1	3	1	2	21
52	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	21
53	3	2	1	1	3	3	3	3	1	3	23
54	1	3	2	3	3	1	3	1	2	3	22
55	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	27
56	2	3	3	3	1	3	3	2	3	3	26
57	3	3	1	3	2	3	3	2	3	3	26
58	3	3	2	3	3	2	1	1	3	3	24
59	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	28
60	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	25
61	2	3	3	3	3	3	1	3	3	1	25
62	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	26
63	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
64	3	3	2	2	2	2	2	2	3	1	22
65	2	1	3	2	3	1	2	3	3	2	22
66	3	2	3	2	2	3	2	1	2	3	23
67	3	2	3	3	3	1	3	3	2	3	26
68	3	2	2	2	2	3	1	3	1	2	21
69	1	1	2	1	1	3	3	3	3	3	21
70	2	3	1	3	3	2	3	3	2	2	24
71	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	27
72	3	3	2	2	2	2	2	2	1	3	22
73	3	3	3	2	3	3	2	3	3	1	26
74	3	2	1	1	3	3	3	3	1	3	23

Lampiran III
Data Interval

Variabel X1

Responden	Nilai Data Interval										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1,000	3,221	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,000	25,872
2	3,460	1,000	3,469	3,271	2,055	3,274	3,154	1,000	1,855	3,189	25,728
3	3,460	3,221	2,167	1,980	3,383	3,274	1,898	1,995	3,130	3,189	27,698
4	2,127	1,886	2,167	1,980	3,383	3,274	1,898	1,995	1,000	3,189	22,899
5	2,127	1,886	2,167	3,271	1,000	2,012	1,898	3,240	1,855	1,916	21,373
6	2,127	3,221	1,000	1,980	2,055	2,012	1,000	1,995	1,855	1,916	19,161
7	3,460	1,886	3,469	3,271	2,055	1,000	3,154	3,240	1,855	3,189	26,580
8	3,460	1,000	3,469	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	3,130	1,916	28,037
9	3,460	3,221	1,000	3,271	1,000	3,274	3,154	1,000	1,000	3,189	23,569
10	1,000	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,000	28,143
11	3,460	3,221	3,469	1,980	3,383	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	30,255
12	3,460	1,000	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	3,240	3,130	3,189	28,418
13	3,460	3,221	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,240	3,130	1,916	29,245
14	3,460	3,221	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	3,240	3,130	1,000	28,056
15	3,460	1,886	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	1,000	3,189	24,586
16	1,000	3,221	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	1,855	3,189	23,241
17	2,127	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	3,130	3,189	28,895
18	2,127	3,221	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,830
19	3,460	3,221	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,749

20	3,460	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	1,000	3,130	3,189	25,834
21	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,916	30,186
22	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	1,916	26,381
23	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	3,240	3,130	1,000	27,116
24	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	3,189	27,655
25	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	31,459
26	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	3,130	1,000	22,918
27	2,127	1,000	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	3,240	3,130	1,916	23,144
28	3,460	1,886	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	1,000	1,855	3,189	24,066
29	3,460	1,886	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,240	1,855	3,189	27,908
30	3,460	1,886	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,240	1,000	1,916	21,978
31	1,000	1,000	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	22,155
32	2,127	3,221	1,000	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	1,855	1,916	25,179
33	2,127	3,221	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	29,188
34	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	1,000	3,189	22,977
35	3,460	3,221	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	3,240	3,130	1,000	28,056
36	3,460	1,886	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	1,000	3,189	24,586
37	1,000	3,221	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	1,855	3,189	23,241
38	2,127	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	3,130	3,189	28,895
39	2,127	3,221	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,830
40	3,460	3,221	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,749
41	3,460	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	1,000	3,130	3,189	25,834
42	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,916	30,186
43	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	1,916	26,381
44	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	3,240	3,130	1,000	27,116
45	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	3,189	27,655

46	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	31,459
47	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	3,130	1,000	22,918
48	2,127	1,000	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	3,240	3,130	1,916	23,144
49	3,460	1,886	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	1,000	1,855	3,189	24,066
50	2,127	1,886	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,240	1,855	3,189	26,575
51	3,460	1,886	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,240	1,000	1,916	21,978
52	1,000	1,000	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	22,155
53	3,460	1,886	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	1,000	3,189	24,586
54	1,000	3,221	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	1,855	3,189	23,241
55	2,127	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	3,130	3,189	28,895
56	2,127	3,221	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,830
57	3,460	3,221	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,749
58	3,460	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	1,000	3,130	3,189	25,834
59	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,916	30,186
60	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	1,916	26,381
61	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	3,240	3,130	1,000	27,116
62	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	3,189	27,655
63	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	31,459
64	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	3,130	1,000	22,918
65	2,127	1,000	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	3,240	3,130	1,916	23,144
66	3,460	1,886	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	1,000	1,855	3,189	24,066
67	3,460	1,886	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,240	1,855	3,189	27,908
68	3,460	1,886	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,240	1,000	1,916	21,978
69	1,000	1,000	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	22,155
70	2,127	3,221	1,000	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	1,855	1,916	25,179
71	2,127	3,221	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	29,188

72	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	1,000	3,189	22,977
73	3,460	3,221	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	3,240	3,130	1,000	28,056
74	3,460	1,886	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	1,000	3,189	24,586
75	1,000	3,221	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	1,855	3,189	23,241
76	2,127	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	3,130	3,189	28,895
77	2,127	3,221	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,830
78	3,460	3,221	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,749
79	3,460	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	1,000	3,130	3,189	25,834
80	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,916	30,186
81	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	1,916	26,381
82	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	3,240	3,130	1,000	27,116
83	3,460	3,221	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	1,995	3,130	3,189	27,655
84	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	31,459
85	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	3,130	1,000	22,918
86	2,127	1,000	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	3,240	3,130	1,916	23,144
87	3,460	1,886	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	1,000	1,855	3,189	24,066
88	3,460	1,886	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,240	1,855	3,189	27,908
89	3,460	1,886	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,240	1,000	1,916	21,978
90	1,000	1,000	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	22,155
91	2,127	3,221	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	3,189	29,188
92	3,460	3,221	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,995	1,000	3,189	22,977
93	3,460	3,221	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	3,240	3,130	1,000	28,056
94	3,460	1,886	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,240	1,000	3,189	24,586
95	1,000	3,221	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	1,855	3,189	23,241
96	2,127	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,240	3,130	3,189	28,895
97	2,127	3,221	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,830

98	3,460	3,221	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	1,995	3,130	3,189	27,749
99	3,460	3,221	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	1,000	3,130	3,189	25,834
100	2,127	3,221	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,240	3,130	1,916	30,186

Variabel X2

Responden	Nilai Data Interval										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3,378	3,311	3,460	3,340	2,040	1,000	3,443	3,503	1,000	3,383	27,858
2	3,378	3,311	2,127	1,991	3,368	3,571	2,053	3,503	3,362	2,055	28,719
3	3,378	2,002	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	2,194	2,065	3,383	28,870
4	3,378	2,002	2,127	1,991	3,368	2,199	2,053	2,194	2,065	3,383	24,761
5	2,079	2,002	3,460	1,991	2,040	2,199	2,053	2,194	3,362	1,000	22,381
6	2,079	2,002	2,127	1,991	2,040	2,199	3,443	1,000	2,065	2,055	21,002
7	2,079	3,311	3,460	1,991	3,368	3,571	2,053	3,503	3,362	2,055	28,754
8	2,079	3,311	3,460	3,340	2,040	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	30,103
9	3,378	3,311	2,127	1,000	3,368	3,571	3,443	1,000	3,362	1,000	25,560
10	3,378	3,311	3,460	3,340	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	30,379
11	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	31,489
12	3,378	2,002	3,460	3,340	3,368	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	31,420
13	1,000	3,311	3,460	3,340	2,040	3,571	3,443	3,503	3,362	3,383	30,413
14	3,378	2,002	3,460	3,340	1,000	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	29,145
15	3,378	3,311	3,460	1,991	3,368	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	26,515
16	1,000	3,311	2,127	1,991	3,368	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	26,379
17	2,079	3,311	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	2,194	2,065	3,383	28,843
18	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	29,031
19	3,378	3,311	2,127	3,340	2,040	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	27,626
20	2,079	2,002	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	28,869
21	3,378	3,311	2,127	3,340	2,040	2,199	3,443	3,503	2,065	3,383	28,789
22	2,079	3,311	2,127	3,340	2,040	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	26,225

23	3,378	1,000	2,127	3,340	2,040	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	27,775
24	2,079	3,311	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	28,850
25	3,378	2,002	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	30,129
26	2,079	2,002	2,127	3,340	1,000	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	23,875
27	1,000	2,002	3,460	3,340	2,040	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	23,993
28	3,378	2,002	2,127	1,991	3,368	3,571	2,053	3,503	2,065	2,055	26,113
29	1,000	3,311	3,460	1,991	3,368	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	29,003
30	3,378	1,000	3,460	1,991	2,040	2,199	2,053	2,194	2,065	2,055	22,436
31	3,378	2,002	3,460	3,340	3,368	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	21,741
32	2,079	3,311	3,460	1,991	2,040	2,199	2,053	1,000	3,362	3,383	24,880
33	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	1,000	3,383	30,385
34	2,079	2,002	2,127	1,000	3,368	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	23,904
35	3,378	2,002	3,460	3,340	1,000	3,571	2,053	3,503	2,065	3,383	27,755
36	3,378	3,311	3,460	1,000	3,368	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	25,524
37	1,000	3,311	1,000	1,991	3,368	1,000	3,443	2,194	2,065	3,383	22,756
38	2,079	3,311	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	30,140
39	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	29,031
40	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	28,954
41	2,079	1,000	1,000	3,340	3,368	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	26,740
42	3,378	3,311	3,460	3,340	2,040	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	31,420
43	2,079	3,311	2,127	3,340	2,040	3,571	2,053	2,194	3,362	2,055	26,132
44	3,378	1,000	3,460	3,340	2,040	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	29,109
45	2,079	3,311	2,127	3,340	3,368	2,199	3,443	2,194	3,362	2,055	27,478
46	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,748
47	2,079	2,002	2,127	3,340	1,000	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	23,875
48	2,079	2,002	3,460	1,991	2,040	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	23,724

49	3,378	2,002	1,000	1,991	3,368	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	23,677
50	1,000	3,311	3,460	1,991	3,368	3,571	2,053	3,503	2,065	3,383	27,706
51	3,378	1,000	3,460	1,991	2,040	3,571	2,053	2,194	2,065	3,383	25,136
52	2,079	3,311	3,460	1,991	3,368	2,199	2,053	3,503	3,362	3,383	28,711
53	3,378	3,311	3,460	1,000	2,040	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	25,127
54	1,000	3,311	1,000	1,991	3,368	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	16,864
55	2,079	2,002	3,460	3,340	2,040	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	23,928
56	2,079	3,311	2,127	1,991	3,368	1,000	3,443	2,194	3,362	3,383	26,259
57	3,378	3,311	2,127	3,340	2,040	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	28,777
58	2,079	1,000	1,000	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	24,295
59	3,378	3,311	3,460	3,340	2,040	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	28,960
60	2,079	3,311	2,127	3,340	2,040	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	28,850
61	3,378	1,000	3,460	3,340	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	28,068
62	2,079	3,311	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	28,850
63	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,748
64	2,079	2,002	2,127	3,340	1,000	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	25,172
65	1,000	2,002	3,460	3,340	2,040	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	27,733
66	3,378	2,002	1,000	1,991	3,368	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	25,067
67	1,000	3,311	3,460	1,991	3,368	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	25,282
68	3,378	1,000	3,460	1,000	2,040	3,571	2,053	3,503	2,065	2,055	24,126
69	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	32,729
70	2,079	3,311	3,460	1,991	2,040	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	24,820
71	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	23,051
72	2,079	2,002	2,127	1,000	3,368	2,199	3,443	1,000	3,362	3,383	23,964
73	3,378	2,002	3,460	3,340	1,000	2,199	3,443	3,503	1,000	3,383	26,708
74	3,378	3,311	3,460	1,000	3,368	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	27,845

75	1,000	3,311	1,000	1,991	3,368	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	26,636
76	2,079	3,311	3,460	3,340	3,368	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	26,565
77	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	1,000	3,443	2,194	3,362	3,383	28,906
78	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	30,105
79	2,079	1,000	1,000	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	24,295
80	3,378	3,311	3,460	3,340	2,040	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	28,960
81	2,079	3,311	2,127	3,340	2,040	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	28,850
82	3,378	1,000	3,460	3,340	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	28,068
83	2,079	3,311	2,127	3,340	3,368	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	28,850
84	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,748
85	2,079	2,002	2,127	3,340	1,000	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	25,172
86	1,000	2,002	3,460	3,340	2,040	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	27,733
87	3,378	2,002	1,000	1,991	3,368	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	25,067
88	1,000	3,311	3,460	1,991	3,368	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	25,282
89	3,378	1,000	3,460	1,000	2,040	3,571	2,053	3,503	2,065	2,055	24,126
90	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	32,729
91	3,378	3,311	3,460	3,340	3,368	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	28,795
92	2,079	2,002	2,127	1,000	3,368	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	16,770
93	3,378	2,002	3,460	3,340	1,000	2,199	3,443	3,503	1,000	3,383	26,708
94	3,378	3,311	3,460	1,000	3,368	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	27,845
95	1,000	3,311	1,000	1,991	3,368	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	26,636
96	2,079	3,311	3,460	3,340	3,368	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	26,565
97	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	1,000	3,443	2,194	3,362	3,383	28,906
98	3,378	3,311	2,127	3,340	3,368	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	30,105
99	2,079	1,000	1,000	3,340	3,368	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	24,295
100	3,378	3,311	3,460	3,340	2,040	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	28,960

Variabel Y

Responden	Nilai Data Interval										Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	1,000	3,443	3,503	1,000	3,383	26,610
2	3,469	3,271	2,055	3,274	3,154	3,571	2,053	3,503	3,362	2,055	29,768
3	2,167	1,980	3,383	3,274	1,898	3,571	3,443	2,194	2,065	3,383	27,359
4	2,167	1,980	3,383	3,274	1,898	2,199	2,053	2,194	2,065	3,383	24,598
5	2,167	3,271	1,000	2,012	1,898	2,199	2,053	2,194	3,362	1,000	21,157
6	1,000	1,980	2,055	2,012	1,000	2,199	3,443	1,000	2,065	2,055	18,810
7	3,469	3,271	2,055	1,000	3,154	3,571	2,053	3,503	3,362	2,055	27,494
8	3,469	3,271	3,383	2,012	3,154	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	31,163
9	1,000	3,271	1,000	3,274	3,154	3,571	3,443	1,000	3,362	1,000	24,075
10	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,443
11	3,469	1,980	3,383	3,274	3,154	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	31,226
12	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	30,271
13	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,571	3,443	3,503	3,362	3,383	31,540
14	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	29,970
15	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	22,818
16	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	27,557
17	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	2,199	3,443	2,194	2,065	3,383	27,273
18	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	27,676
19	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	26,185
20	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	27,787
21	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	2,065	3,383	31,146
22	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	25,987

23	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	30,289
24	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	27,284
25	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	31,133
26	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	23,440
27	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	23,882
28	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	3,571	2,053	3,503	2,065	2,055	25,924
29	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	30,150
30	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	2,199	2,053	2,194	2,065	2,055	21,043
31	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	16,789
32	1,000	3,271	3,383	2,012	3,154	2,199	2,053	1,000	3,362	3,383	24,818
33	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	1,000	3,383	27,809
34	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	23,440
35	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	3,571	2,053	3,503	2,065	3,383	28,581
36	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	22,818
37	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	3,443	2,194	2,065	3,383	25,061
38	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	28,569
39	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	27,676
40	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	26,185
41	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	27,787
42	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,443
43	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	2,053	2,194	3,362	2,055	25,895
44	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	30,289
45	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	2,055	25,913
46	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,443
47	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	23,440
48	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	23,882

49	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	24,615
50	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	3,571	2,053	3,503	2,065	3,383	28,854
51	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,571	2,053	2,194	2,065	3,383	23,743
52	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	2,199	2,053	3,503	3,362	3,383	25,096
53	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	23,749
54	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	19,170
55	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	24,995
56	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,000	3,443	2,194	3,362	3,383	27,551
57	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	27,336
58	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	25,342
59	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	29,983
60	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	28,613
61	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	30,289
62	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	27,284
63	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,443
64	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	24,737
65	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	27,622
66	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	26,004
67	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	26,429
68	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,571	2,053	3,503	2,065	2,055	23,724
69	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	26,468
70	1,000	3,271	3,383	2,012	3,154	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	24,759
71	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	20,475
72	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	2,199	3,443	1,000	3,362	3,383	23,500
73	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	2,199	3,443	3,503	1,000	3,383	27,533
74	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	25,139

75	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	28,941
76	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	24,995
77	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,000	3,443	2,194	3,362	3,383	27,551
78	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	27,336
79	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	25,342
80	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	29,983
81	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	3,443	2,194	3,362	3,383	28,613
82	3,469	3,271	3,383	3,274	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	30,289
83	2,167	3,271	2,055	2,012	3,154	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	27,284
84	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	32,443
85	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	3,571	3,443	2,194	3,362	2,055	24,737
86	3,469	1,980	3,383	1,000	1,898	2,199	3,443	3,503	3,362	3,383	27,622
87	3,469	1,980	2,055	3,274	1,898	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	26,004
88	3,469	3,271	3,383	1,000	3,154	2,199	1,000	3,503	2,065	3,383	26,429
89	2,167	1,980	2,055	3,274	1,000	3,571	2,053	3,503	2,065	2,055	23,724
90	2,167	1,000	1,000	3,274	3,154	3,571	2,053	3,503	3,362	3,383	26,468
91	3,469	1,000	3,383	3,274	3,154	3,571	2,053	2,194	2,065	2,055	26,219
92	2,167	1,980	2,055	2,012	1,898	1,000	1,000	2,194	1,000	1,000	16,306
93	3,469	1,980	3,383	3,274	1,898	2,199	3,443	3,503	1,000	3,383	27,533
94	1,000	1,000	3,383	3,274	3,154	3,571	3,443	2,194	2,065	2,055	25,139
95	2,167	3,271	3,383	1,000	3,154	3,571	3,443	3,503	2,065	3,383	28,941
96	2,167	3,271	3,383	2,012	3,154	3,571	2,053	1,000	1,000	3,383	24,995
97	3,469	3,271	1,000	3,274	3,154	1,000	3,443	2,194	3,362	3,383	27,551
98	1,000	3,271	2,055	3,274	3,154	2,199	3,443	2,194	3,362	3,383	27,336
99	2,167	3,271	3,383	2,012	1,000	2,199	3,443	3,503	3,362	1,000	25,342
100	3,469	3,271	3,383	3,274	3,154	3,571	3,443	1,000	3,362	2,055	29,983

Lampiran III
Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel X1

Correlations											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
1	Pearson Correlation	1	-,253	,442**	-,008	,210	-,311	,455**	-,008	,094	,598**
	Sig. (2-tailed)		,115	,004	,963	,193	,050	,003	,963	,565	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	Pearson Correlation	-,253	1	-,302	-,150	-,050	-,050	-,500**	,050	,050	-,074
	Sig. (2-tailed)	,115		,059	,355	,759	,759	,001	,759	,759	,649
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3	Pearson Correlation	,442**	-,302	1	-,156	-,045	-,156	,402*	-,156	,347*	,508**
	Sig. (2-tailed)	,004	,059		,337	,781	,337	,010	,337	,028	,001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4	Pearson Correlation	-,008	-,150	-,156	1	,303	-,203	,050	-,103	-,303	,160
	Sig. (2-tailed)	,963	,355	,337		,057	,209	,759	,528	,057	,324
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Pearson Correlation	,210	-,050	-,045	,303	1	-,298	,250	,203	-,398*	,435**
	Sig. (2-tailed)	,193	,759	,781	,057		,062	,119	,209	,011	,005
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6	Pearson Correlation	-,311	-,050	-,156	-,203	-,298	1	-,150	,198	,198	,086
	Sig. (2-tailed)	,050	,759	,337	,209	,062		,355	,221	,221	,600
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7	Pearson Correlation	,455**	-,500**	,402*	,050	,250	-,150	1	-,250	-,150	,409**
	Sig. (2-tailed)	,003	,001	,010	,759	,119	,355		,119	,355	,009
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	Pearson Correlation	-,008	,050	-,156	-,103	,203	,198	-,250	1	-,103	,309
	Sig. (2-tailed)	,963	,759	,337	,528	,209	,221	,119		,528	,052
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
9	Pearson Correlation	,094	,050	,347*	-,303	-,398*	,198	-,150	-,103	1	,272
	Sig. (2-tailed)	,565	,759	,028	,057	,011	,221	,355	,528		,090

Variabel Y

Correlations											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	total
1	Pearson Correlation	1	,032	,467**	-,031	-,226	,333*	-,067	,216	-,200	,404**
	Sig. (2-tailed)		,843	,002	,850	,160	,036	,683	,181	,216	,010
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	Pearson Correlation	,032	1	-,097	,290	-,003	-,097	,032	,051	,032	,343*
	Sig. (2-tailed)	,843		,552	,070	,985	,552	,843	,756	,843	,030
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3	Pearson Correlation	,467**	-,097	1	,092	-,226	,067	-,333*	,339*	-,200	,299
	Sig. (2-tailed)	,002	,552		,570	,160	,683	,036	,032	,216	,061
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4	Pearson Correlation	-,031	,290	,092	1	-,188	-,031	,092	-,254	-,154	,232
	Sig. (2-tailed)	,850	,070	,570		,245	,850	,570	,114	,342	,149
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	Pearson Correlation	-,226	-,003	-,226	-,188	1	,162	,420**	,051	,937**	,513**
	Sig. (2-tailed)	,160	,985	,160	,245		,319	,007	,756	,000	,001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6	Pearson Correlation	,333*	-,097	,067	-,031	,162	1	,067	,216	,067	,475**
	Sig. (2-tailed)	,036	,552	,683	,850	,319		,683	,181	,683	,002
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
7	Pearson Correlation	-,067	,032	-,333*	,092	,420**	,067	1	,216	,333*	,475**
	Sig. (2-tailed)	,683	,843	,036	,570	,007	,683		,181	,036	,002
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
8	Pearson Correlation	,216	,051	,339*	-,254	,051	,216	,216	1	-,031	,492**
	Sig. (2-tailed)	,181	,756	,032	,114	,756	,181	,181		,850	,001

Lampiran IV
Uji Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			
						F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,683 ^a	,467	,456	1,73006	,467	42,516	2	97	,000

a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	254,508	2	127,254	42,516	,000 ^b
	Residual	290,332	97	2,993		
	Total	544,840	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	9,138	1,768		5,170	,000	5,630	12,646
	X1	,113	,130	,118	,869	,387	-,146	,372
	X2	,520	,122	,581	4,262	,000	,278	,762

a. Dependent Variable: Y

Lampiran V
Tabulasi Data

Variabel X1

1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0	13,0	13,0
	jarang	34	34,0	34,0	47,0
	sering	53	53,0	53,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	12	12,0	12,0	12,0
	jarang	28	28,0	28,0	40,0
	sering	60	60,0	60,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	36	36,0	36,0	47,0
	sering	53	53,0	53,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	10	10,0	10,0	10,0
	jarang	26	26,0	26,0	36,0
	sering	64	64,0	64,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	30	30,0	30,0	41,0
	sering	59	59,0	59,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	9	9,0	9,0	9,0
	jarang	39	39,0	39,0	48,0
	sering	52	52,0	52,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	8	8,0	8,0	8,0
	jarang	28	28,0	28,0	36,0
	sering	64	64,0	64,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0	14,0	14,0
	jarang	43	43,0	43,0	57,0
	sering	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0	13,0	13,0
	jarang	33	33,0	33,0	46,0
	sering	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	31	31,0	31,0	42,0
	sering	58	58,0	58,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Variabel X2

1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0	14,0	14,0
	jarang	41	41,0	41,0	55,0
	sering	45	45,0	45,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0	13,0	13,0
	jarang	27	27,0	27,0	40,0
	sering	60	60,0	60,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	31	31,0	31,0	42,0
	sering	58	58,0	58,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0	15,0	15,0
	jarang	30	30,0	30,0	45,0
	sering	55	55,0	55,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0	15,0	15,0
	jarang	22	22,0	22,0	37,0
	sering	63	63,0	63,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	9	9,0	9,0	9,0
	jarang	39	39,0	39,0	48,0
	sering	52	52,0	52,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	8	8,0	8,0	8,0
	jarang	28	28,0	28,0	36,0
	sering	64	64,0	64,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0	14,0	14,0
	jarang	43	43,0	43,0	57,0
	sering	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0	13,0	13,0
	jarang	33	33,0	33,0	46,0
	sering	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	31	31,0	31,0	42,0
	sering	58	58,0	58,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Variabel Y

1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	36	36,0	36,0	47,0
	sering	53	53,0	53,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	20	20,0	20,0	31,0
	sering	69	69,0	69,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0	14,0	14,0
	jarang	41	41,0	41,0	55,0
	sering	45	45,0	45,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	13	13,0	13,0	13,0
	jarang	27	27,0	27,0	40,0
	sering	60	60,0	60,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	11,0	11,0	11,0
	jarang	31	31,0	31,0	42,0
	sering	58	58,0	58,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0	15,0	15,0
	jarang	30	30,0	30,0	45,0
	sering	55	55,0	55,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	15	15,0	15,0	15,0
	jarang	22	22,0	22,0	37,0
	sering	63	63,0	63,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	16	16,0	16,0	16,0
	jarang	29	29,0	29,0	45,0
	sering	55	55,0	55,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0	14,0	14,0
	jarang	19	19,0	19,0	33,0
	sering	67	67,0	67,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

10

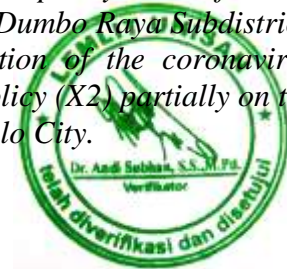
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	14	14,0	14,0	14,0
	jarang	23	23,0	23,0	37,0
	sering	63	63,0	63,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

ABSTRACT

RIZAL DATAU. S2116085. THE EFFECT OF CORONAVIRUS COUNTERMEASURE POLICY IMPLEMENTATION ON COMMUNITY BEHAVIOR IN DUMBO RAYA SUBDISTRICT, GORONTALO CITY

This study aims to: 1) analyze the effect of the implementation of the coronavirus countermeasure policy through information (X1) on the community behavior in Dumbo Raya Subdistrict, Gorontalo City, 2) analyze the effect of the implementation of the coronavirus countermeasure policy through the content of the policy (X2) on the community behavior in Dumbo Raya Subdistrict, Kota Gorontalo, 3) analyze the effect of the implementation of the coronavirus countermeasure policy through information (X1) and policy content (X2) on community behavior in Dumbo Raya Subdistrict, Gorontalo City. This study applies a quantitative method. The data collection techniques used are questionnaires, observations, and documentation. The data analysis techniques are Univariate, Bivariate, and Multivariate Analysis. The results of the study indicate that there is an effect of the implementation of the coronavirus countermeasure policy in the form of information (X1) and the content of the policy (X2) simultaneously on community behavior in Dumbo Raya Subdistrict, Gorontalo City. The results of data analysis using SPSS version 25 show that the F-count value is 42.516 and the F-table value is 3.09, which means that F-count is greater than F-table. The variable of community behavior can be explained by using exogenous independent variables in the form of information (X1) and policy content (X2) of 45.6%. The value of 54.4% is affected by other variables outside of this study. There is no effect on the implementation of the coronavirus countermeasure policy in the form of information (X1) partially on the community behavior in Dumbo Raya Subdistrict, Gorontalo City. There is an effect of the implementation of the coronavirus countermeasure policy in the form of the content of the policy (X2) partially on the community behavior in Dumbo Raya Subdistrict, Gorontalo City.

Keywords: policy implementation, community behavior



ABSTRAK

RIZAL DATAU. S2116085. PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAGGULANGAN VIRUS CORONA TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT DI KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui informasi (X1) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, 2) menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona melalui informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kusioner, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis Univariat, Bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona berupa Informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) secara simultan terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 25 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42,516 dan nilai F_{tabel} 3.09, dengan demikian F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} . Dengan demikian variabel perilaku masyarakat dapat diterangkan dengan menggunakan variabel-variabel independen eksogenous berupa informasi (X1) dan isi kebijakan (X2) sebesar 45,6%. Nilai sebesar 54,4% disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Tidak terdapat pengaruh implementasi kebijakan penanggulangan virus corona berupa Informasi (X1) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. Terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan penanggulangan virus corona berupa isi kebijakan (X2) secara parsial terhadap perilaku masyarakat di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

Kata kunci: implementasi kebijakan, perilaku masyarakat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, UISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHISAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisun Clurumlulu Lt.3 - Jin. Aclimud Nudjumuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3736/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Camat Dumbo Raya

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Rizal Datau
NIM : S2115085
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Lokasi Penelitian : KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TERHADAP
PERILAKU MASYARAKAT DUMBO RAYA KOTA
GORONTALO

Atas kebijakan dan keaja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 25 November 2021
Ketua,

i#r
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KECAMATAN DUMBO RAYA

Jalan Mayor Dullah Kclurahan Talumolo Kola Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/Sekr-DR/XI/[S]/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIZAL DATAU
NIM : S2115085
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Virus Corona Terhadap Perilaku Masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Universitas : Ichsan Gorontalo
Tempat Penelitian : Kecamatan Dumbo Raya
Waktu Penelitian : 3 Bulan

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Dumbo Raya pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021 dengan Judul Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan Virus Corona Terhadap Perilaku Masyarakat Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Oktober 2021


CAMAT DUMBO RAYA

SUTAMI SURATINOYO, S.STP, M.Si
Nip. 19840412 200212 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
**UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddln No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0971/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Oengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIZAL DATAU
NIM : S2115085
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Implementasi Kebijakan Penanggulangan
Virus Corona Terhadap Perilaku Masyarakat Di
Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Tumitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pemyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Tumitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 26 November 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

S.21.15.085

SKRIPSI_S.21.15.085, Rizal Datau, Pengaruh Implementasi Kebijakan PENAGGULANGAN VIRU...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	www.medialitupengetahuan.com	2%
2	repository.unsa.ac.id	2%
3	ematubonga.blogspot.com	2%
4	eprints.unidp.ac.id	2%
5	www.scribd.com	2%
6	repository.stienobel-indonesia.ac.id	1%
7	123dok.com	1%
8	repository.unsa.ac.id	<1%
9	vdocuments.mx	<1%
10	id.scribd.com	<1%
11	text-id.123dok.com	<1%
12	aimos.ugm.ac.id	<1%
13	repository.upategal.ac.id	<1%
14	www.jogloabang.com	<1%
15	repository.uns.ac.id	<1%
16	repository.unlir.ac.id	<1%
17	pt.scribd.com	<1%
18	arifinmktbaktipersada.wordpress.com	<1%
19	id.123dok.com	<1%
20	repository.unmuljember.ac.id	<1%
21	repository.uinvaluddin.ac.id	<1%
22	repository.unrej.ac.id	<1%
23	media.neliti.com	<1%
24	repository.uinbanten.ac.id	<1%
25	statik.unesa.ac.id	<1%
26	repository.uhn.ac.id	<1%
27	fliphtml5.com	<1%

30	pt.slideshare.net	INTERNET	<1%
32	pasca.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
36	teforoudahomal.com	INTERNET	<1%
31	core.ac.uk	INTERNET	<1%
32	de.slideshare.net	INTERNET	<1%
33	eprints.unisbank.ac.id	INTERNET	<1%
34	adoc.pub	INTERNET	<1%
36	magammar.blogspot.com	INTERNET	<1%
36	repository.ipb.ac.id	INTERNET	<1%
37	ejournal.unsra.ac.id	INTERNET	<1%
38	archive.org	INTERNET	<1%
39	gabenta.com	INTERNET	<1%
40	repository.unpas.ac.id	INTERNET	<1%
41	jurnal.unisabitar.ac.id	INTERNET	<1%
42	jurnal.untan.ac.id	INTERNET	<1%
43	publikasi.uniska-kediri.ac.id	INTERNET	<1%
44	issuu.com	INTERNET	<1%
45	thesis.eur.nl	INTERNET	<1%
45	jurnal.umrah.ac.id	INTERNET	<1%
47	ejournal.ip.fkip-umul.ac.id	INTERNET	<1%
48	www.journal.steamkop.ac.id	INTERNET	<1%
49	Bambang Ari Satria. "STUDY ON IMPLEMENTATION OF WAREHOUSE RECEIPT POLICY IN PEPPER COMMODITIES IN BANGKA BELITUNG ARCHIPELAGO PROVINCE", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)...	ONLINE	<1%

Excluded search repositories:
Submitted Works

Excluded from document:
Bibliography
Quotes
Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:
None

BIO DATA

N A M A : RIZAL DATAU
N I M : S2115085
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Gorontalo, 29 Nopember 1972
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
A G A M A : Islam
PEKERJAAN : Mahasiswa
ALAMAT : Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosipat W Kecamatan
Kota Barat Kota Gorontalo
NO.TELEPON/HP : 081241231717



Hormat saya

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read "Rizal Datau".

RIZAL DATAU